



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

KKP
2025

panganbiru

08
MUSYI SAHUT

EKONOMI BIRU UNTUK
INDONESIA EMAS



Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2026

POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN BITUNG

Kementerian Kelautan dan Perikanan
Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM
Kelautan dan Perikanan
Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung



#Berintegritas
nova if
unggul



MEMU
OCEAN INSTITUTE
OF INDONESIA

BerAKHLAK
Berakhlak, Berprestasi, Berkeadilan, Berkeadilan, Berkeadilan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja (LKj) Politeknik KP Bitung, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, TW I Tahun 2026 ini disusun sebagai salah satu bentuk akuntabilitas atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi, tugas dan fungsi organisasi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Penyusunan Laporan Kinerja ini berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Kami menyadari bahwa penyusunan laporan Kinerja Tahun 2025 ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu kami mengharapkan masukan, tanggapan maupun saran dan kritik yang bersifat membangun dari pembaca, demi kesempurnaan dan kelancaran dalam pencapaian target kinerja kedepannya.

Bitung, 15 April 2026
Direktur Politeknik KP Bitung,



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Rudi Saranga

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	ii
Daftar Isi.....	lli
Ikhtisar Eksekutif.....	1
BAB I PENDAHULUAN.....	7
A.Latar Belakang.....	7
B. Tujuan.....	10
C. Tugas dan Fungsi.....	12
D. Keragaman SDM Politeknik KP Bitung.....	19
E. Sistematika Laporan Kinerja.....	20
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	21
A. Rencana Strategis 2025 – 2029.....	21
B. Perjanjian Kinerja.....	27
C. Pengukuran Kinerja.....	29
BAB III AUNTABILITAS KINERJA.....	31
A. Prestasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2025.....	31
B. Evaluasi dan Analisis Kinerja.....	32
C. Akuntabilitas Keuangan.....	73
D. Kegiatan Lain.....	78
BAB IV PENUTUP.....	77
A. Kesimpulan.....	77
B. Permasalahan dan Rekomendasi.....	79
C. Efisiensi Anggaran dan Sumber Daya.....	81
LAMPIRAN.....	81

IKHTISAR EKSEKUTIF

Rencana kinerja Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung difokuskan untuk mendukung kinerja Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan dan diimplementasikan dalam bentuk sasaran kinerja pada setiap tahunnya. Sasaran kegiatan Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung mengacu kepada dua Sasaran Kegiatan (SK).

Untuk mencapai dua Sasaran Kegiatan tersebut, pada TW I tahun 2026 Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung menetapkan 16 Indikator Kinerja (IK) yang telah diperjanjikan antara Direktur Politeknik KP Bitung dengan Kepala Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan. Sasaran Kegiatan tersebut adalah :

1. Terselenggaranya Pendidikan Vokasi Kelautan dan Perikanan yang Kompeten;
2. Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan.

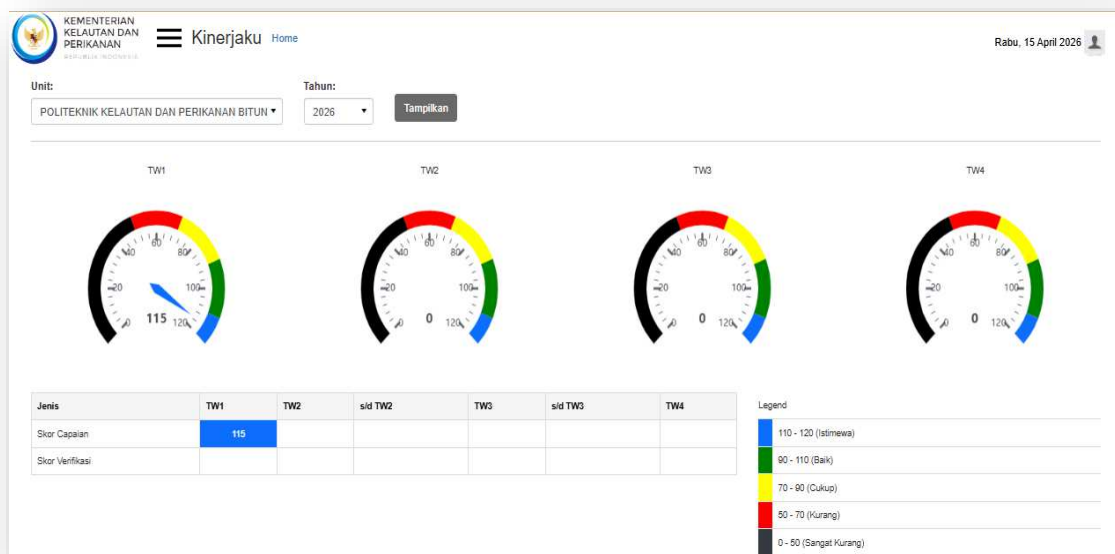
Guna mencapai Sasaran Kegiatan yang diharapkan, Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung telah melakukan pemantauan perkembangan pencapaian kinerja secara periodik, baik bulanan maupun Triwulanan.

Pada TW I tahun 2026, dari 2 SK dengan 16 IK, terdapat 3 IKU diukur dengan hasil capaian : 2 IKU tercapai dengan status istimewa dan 1 IKU tercapai dengan status baik berdasarkan pengukuran kinerja yang terdapat dalam Aplikasi Kinerjaku (kinerjaku.kkp.go.id), capaian Nilai Kinerja Organisasi per 14 April 2026 adalah 115% dari target.

Secara umum kinerja Politeknik KP Bitung TW I Tahun 2026 sangat Baik, namun demikian dalam rangka peningkatan kinerja perlu dilakukan evaluasi atas pencapaian di TW I guna mempertahankan bahkan meningkatkan capaian kinerja di TW berikutnya.

Seluruh penanggung jawab IK dan Tim Pengelola Kinerja perlu menindaklanjuti dan memperbaiki capaian kinerja pada IK yang belum maksimal dicapai pada tahun ini agar kedepannya lebih optimal lagi dalam sistem pengawasan untuk kemajuan peningkatan kinerja serta mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pada IK yang telah mencapai target yang ditetapkan.

Pada tahun 2025, Politeknik KP Bitung memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan 2 Sasaran Kegiatan dan 16 Indikator Kinerja Utama. Pengukuran capaian kinerja Politeknik KP Bitung TW I Tahun 2026 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja utama *key performance indicator* pada masing-masing perspektif. Pencatatan dan pengukuran kinerja pegawai dilaksanakan secara sistematis dan terintegrasi melalui *website* resmi Kementerian Kelautan dan Perikanan pada aplikasi Kinerjaku (kinerjaku.kkp.go.id). Sistem ini merupakan instrumen manajemen kinerja yang digunakan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk memastikan setiap organisasi menyusun, melaksanakan, memantau, dan melaporkan capaian kinerjanya secara berkala. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data capaian kinerja Politeknik KP Bitung TW I tahun 2026 sebesar 115%, sebagaimana dashboard kinerjaku sebagai berikut:



Gambar Dashboard Kinerjaku Level 3 Politeknik KP Bitung TW I Tahun 2026

Pada TW I, dari 16 IKU, 2 IKU berstatus Istimewa dan 1 IKU berstatus baik, rincian target dan realiasi IKU tersebut adalah sebagai berikut :

No	Indikator	Target Tahun 2026	Target TW I	Capaian TW I	Capaian (%)
1	Lulusan Politeknik KP Bitung yang terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri dan/atau Dunia Kerja (orang)	125	7	16	120
2	Jumlah lulusan Politeknik KP Bitung (orang)	169			
3	Jumlah kerjasama Politeknik KP Bitung di tahun berjalan (kesepakatan)	2			
4	Persentase lulusan Politeknik KP Bitung yang besertifikasi kompetensi (%)	100			
5	Kajian pendidikan tinggi kelautan dan perikanan Politeknik KP Bitung (Kajian)	3			
6	Kelompok masyarakat yang mengadopsi ilmu pengetahuan dan teknologi di Politeknik KP Bitung (kelompok)	2			
7	Jumlah pendidik Politeknik KP Bitung yang lulus sertifikasi profesi (Orang)	5			
8	Penilaian Mutu Pendidikan Tinggi Kelautan dan Perikanan (%)	79			
9	Persentase Sarana Prasarana Pendidikan KP yang ditingkatkan kapasitasnya di Politeknik KP Bitung (%)	80			
10	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Politeknik KP Bitung (%)	86	86	86	100
11	Penilaian Mandiri SAKIP Politeknik KP Bitung (Nilai)	82			
12	Indeks Profesionalitas ASN Politeknik KP Bitung (Indeks)	85			
13	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BPPSDM KP (Nilai)	71			
14	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Politeknik KP Bitung (%)	77	77	100	120
15	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Politeknik KP Bitung (Nilai)	92,1			
16	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Politeknik KP Bitung (Nilai)	71,75			

Agar efisiensi keluaran maupun efisiensi kegiatan berjalan dengan baik perlu mendapatkan perhatian dan pengawalan secara baik dalam rangka peningkatan kinerja dan konsistensi terhadap pelaksanaan anggaran di tahun berikutnya. Secara umum kinerja Politeknik KP Bitung TW I tahun 2026 sangat baik. Namun demikian, dalam rangka peningkatan kinerja perlu dilakukan pengawalan yang baik terhadap capaian IK agar triwulan berikutnya dapat meningkatkan capaian kinerja organisasi Politeknik KP Bitung.



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka pertanggung jawaban pelaksanaan APBN/APBD, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah mengamanatkan setiap entitas pelaporan wajib menyajikan laporan keuangan dan laporan kinerja. Sebagai entitas pelaporan, Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung wajib menyusun laporan keuangan dan laporan kinerja. Selanjutnya, Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, memberikan definisi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggung jawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Lebih lanjut, akuntabilitas kinerja didefinisikan sebagai perwujudan kewajiban suatu instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/traget kinerja yang telah ditetapkan melalui kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, sejumlah peraturan perundang-undangan menjadi *guidance* bagi praktek-praktek penyelenggaraan pemerintahan yang mengedepankan *good governance* dan *clean government*, antara lain:

1. Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;



2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; dan
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan.

B. Tujuan

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Penyusunan Laporan Kinerja Politeknik KP Bitung ini, bertujuan:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur atas capaian pada Tahun 2025.
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Politeknik KP Bitung untuk meningkatkan kinerjanya.

C. Tugas dan Fungsi

Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung sebagaimana Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 91/PERMEN-KP/2020, tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut Politeknik KP Bitung adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi di bidang kelautan dan perikanan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan yang menangani pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan.



Pembinaan Politeknik KP Bitung secara teknis akademik dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi, dan pembinaan secara teknis operasional dan administratif dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan dan dipimpin oleh Direktur.

Politeknik KP Bitung mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan vokasi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kelautan dan perikanan.

Dalam melaksanakan tugas Politeknik KP Bitung menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan kegiatan Politeknik Kelautan dan Perikanan;
- b. penyusunan rencana dan program pendidikan;
- c. pelaksanaan dan pengembangan pendidikan vokasi yang meliputi pengajaran dan pelatihan dibidang kelautan dan perikanan;
- d. pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- e. pengelolaan administrasi akademik dan ketarunaan;
- f. pengembangan sistem penjaminan mutu;
- g. pelaksanaan pembinaan karakter;
- h. pembinaan sivitas akademika dan hubungannya dengan lingkungan;
- i. pengelolaan kesejahteraan taruna dan praktik kerja taruna serta urusan alumni;
- j. pelaksanaan pengawasan internal
- k. pengelolaan perpustakaan, laboratorium, instalasi, prasarana dan sarana lainnya;
- l. dan pengelolaan keuangan, kepegawaian, tata usaha, dan kerumahtanggaan. Dalam melaksanakan fungsi tersebut, Politeknik KP Bitung didukung oleh:
 - a. Direktur dan Wakil Direktur;
 - b. Dewan Penyantun;
 - c. Senat ;
 - d. Satuan Penjaminan Mutu ;
 - e. Satuan Pengawas Internal ;



- f. Subbagian Umum;
- g. Program Studi ;
- h. Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
- i. Pusat Pembinaan Karakter;
- j. Unit Penunjang; dan
- k. Kelompok Jabatan Fungsional

a. Direktur dan Wakil Direktur

Direktur merupakan Dosen yang diberikan tugas tambahan memimpin Politeknik KP Bitung. Dalam melaksanakan tugasnya direktur dibantu Wakil Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur, terdiri dari

- 1) Wakil Direktur Bidang Administrasi Akademik yang selanjutnya disebut Wakil Direktur I, mempunyai tugas membantu direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, penjaminan mutu, pembinaan tenaga pendidik dan kependidikan, serta kerja sama pendidikan.
- 2) Wakil Direktur Bidang Administrasi Umum, yang selanjutnya disebut Wakil Direktur II, mempunyai tugas membantu direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan bidang keuangan, pengelolaan barang milik negara, kepegawaian, hukum, tata usaha, dan kerumahtanggaan.
- 3) Wakil Direktur Bidang Ketarunaan dan Alumni, yang selanjutnya disebut Wakil Direktur III, mempunyai tugas membantu direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan bidang pembinaan ketarunaan dan alumni, serta pembinaan karakter

Wakil Direktur I, Wakil Direktur II, dan Wakil Direktur III sebagaimana dimaksud, merupakan dosen yang diberi tugas tambahan membantu direktur.

b. Dewan Penyantun

Dewan Penyantun merupakan bagian dari organ Politeknik KP Bitung yang mempunyai tugas memberikan pertimbangan non akademik dan fungsi lain. Ketentuan mengenai Dewan Penyantun diatur dalam Statuta Politeknik KP Bitung yang diatur dengan Peraturan Menteri.



c. Senat

Senat merupakan unsur penyusun kebijakan Politeknik KP Bitung yang mempunyai tugas memberikan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik. Ketentuan mengenai Senat diatur dalam Statuta Politeknik KP Bitung yang diatur dengan Peraturan Menteri.

d. Satuan Penjamin Mutu

Satuan Penjaminan Mutu merupakan unsur penjaminan mutu yang mempunyai tugas melaksanakan, mengoordinasikan, memantau, dan menilai kegiatan pelaksanaan, pengembangan pembelajaran, dan sistem penjaminan mutu pendidikan.

Satuan Penjaminan Mutu dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur, dan pembinaan secara teknis dilakukan oleh Wakil Direktur I.

e. Satuan Pengawas Internal

Satuan Pengawas Internal merupakan unsur pengawas yang mempunyai tugas pengawasan non akademik untuk dan atas nama Direktur Politeknik KP Bitung. Satuan Pengawas Internal dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur dan pembinaan secara teknis dilakukan oleh Wakil Direktur I.

f. Subbagian Umum

Subbagian Umum merupakan unsur pelaksana administrasi bidang ketatausahaan.

Subbagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur dan dibina oleh Wakil Direktur II.

Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan, urusan keuangan, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, persuratan, kearsipan, dokumentasi, rumah tangga, pengelolaan barang milik negara dan perlengkapan.

g. Program Studi

Program Studi adalah unsur pelaksana akademik Politeknik KP Bitung yang mempunyai tugas melaksanakan pendidikan vokasi dalam sebagian atau satu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kelautan dan perikanan.



Program Studi mempunyai tugas memimpin, melaksanakan, dan mengembangkan pendidikan, dan pengajaran, serta pembinaan civitas akademika.

Program Studi dipimpin oleh Ketua Program Studi, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur, dan secara teknis pembinaan dilakukan oleh Wakil Direktur I

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Ketua Program Studi dibantu oleh Sekretaris. Program Studi terdiri atas:

- a. Program Studi Diploma III Teknik Penangkapan Ikan;
- b. Program Studi Diploma III Teknik Pengolahan Produk Perikanan; dan
- c. Program Studi Diploma III Mekanisasi Perikanan.

h. Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan penelitian ilmiah murni dan terapan, pengabdian kepada masyarakat, pelaksanaan publikasi, peningkatan relevansi program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan pelaksanaan urusan administrasi pusat, serta evaluasi dan pelaporan.

Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dipimpin oleh Kepala, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur, dan pembinaan secara teknis dilakukan oleh Wakil Direktur I. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dibantu oleh Sekretaris.

i. Pusat Pembinaan Karakter

Pusat Pembinaan Karakter mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pelayanan kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler, bimbingan dan konseling, pembinaan fisik, mental, dan kesamaptaan taruna, pembinaan tata kehidupan kampus, pelayanan akomodasi, konsumsi, dan kesehatan taruna, dan urusan administrasi Pusat

Pusat Pembinaan Karakter sebagaimana dimaksud dipimpin oleh Kepala, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur, dan pembinaan secara teknis dilakukan oleh Wakil Direktur III.

Dalam melaksanakan tugas Kepala Pusat Pembinaan Karakter dibantu oleh Sekretaris



j. Unit Penunjang

Unit Penunjang merupakan unsur penunjang untuk melaksanakan penyelenggaraan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi di lingkungan Politeknik KP Bitung. Unit Penunjang sebagaimana dimaksud dipimpin oleh Kepala, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur dan dibina oleh Wakil Direktur

I. Unit Penunjang sebagaimana dimaksud terdiri atas :

- a. Unit Perpustakaan, mempunyai tugas melakukan pengelolaan buku-buku dan bahan perpustakaan lainnya serta melayani pengguna jasa perpustakaan dan audio visual serta dokumentasi.
- b. Unit Laboratorium, mempunyai tugas melakukan pengelolaan laboratorium untuk kegiatan akademik, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- c. Unit Teknologi Informatika, mempunyai tugas melakukan dan mengoordinasikan kegiatan peningkatan dan pengembangan keterampilan komputer kepada taruna dan pegawai
- d. Unit Praktik Kerja mempunyai tugas melakukan pengelolaan sarana dan prasarana, serta pelayanan kegiatan praktik sesuai dengan Program Studi
- e. Unit Sertifikasi mempunyai tugas melakukan pengelolaan sarana dan prasarana, serta kegiatan sertifikasi keahlian dan kompetensi
- f. Unit Asrama mempunyai tugas melakukan pengelolaan sarana dan prasarana, pelayanan akomodasi, dan konsumsi
- g. Unit Kesehatan mempunyai tugas melakukan pengelolaan sarana dan prasarana, dan pelayanan kesehatan taruna dan pegawai; dan
- h. Unit Bimbingan dan Konseling mempunyai tugas melakukan pelayanan bimbingan dan konseling kepada taruna.

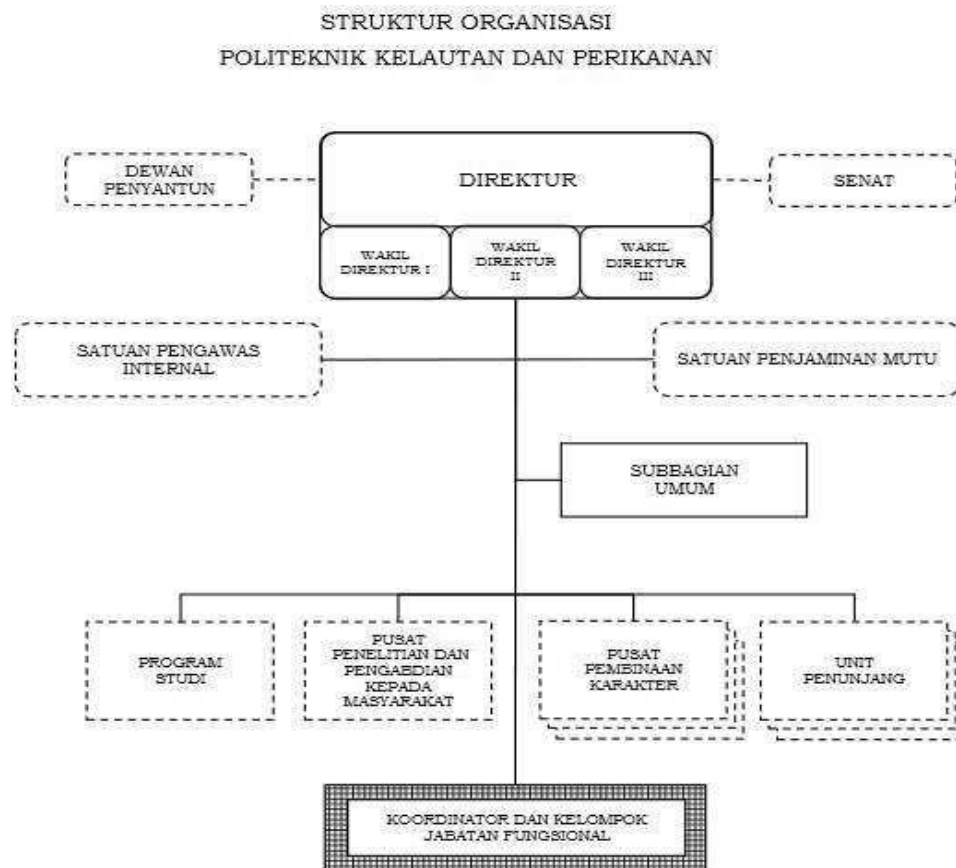
k. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud terdiri atas : Dosen, Pustakawan, Pranata Komputer, dan jabatan fungsional lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Masing-masing kelompok jabatan fungsional dikoordinasikan oleh seorang pejabat fungsional yang ditetapkan oleh



Direktur. Jumlah pejabat fungsional sebagaimana ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kelompok jabatan fungsional yang merupakan kelompok tenaga pengajar di lingkungan Politeknik KP Bitung, berada dan bertanggung jawab kepada Direktur, secara teknis pembinaan dilakukan oleh Wakil Direktur I dan Ketua Program Studi.



D. Keragaman SDM Politeknik KP Bitung

Sampai dengan akhir 2026 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Politeknik KP Bitung didukung oleh 80 ASN, sebagaimana Data pada SIMPEG www.ropeg.kkp.go.id Politeknik KP Bitung per 31 Desember Tahun 2025 dengan rincian sbb :

- Pegawan Negeri Sipil 62 Orang
- Calon Pegawai Negeri Sipil 3 orang
- Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 11 Orang
- PPPK Paruh Waktu 1 orang
- PJLP sebanyak 3 orang.



E. **Sistematika Laporan Kinerja**

Merujuk Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja, sistematika penyajian laporan sebagai berikut :

1. ***Ringkasan Eksekutif***, pada bagian ini berisi ringkasan dari laporan ini, antara lain berisi uraian singkat tentang tujuan, sasaran, capaian kinerja dan kendala selama triwulan I Tahun 2026
2. ***Bab I Pendahuluan***, pada bab ini berisi hal-hal umum tentang Politeknik KP Bitung seperti tugas dan fungsi, struktur organisasi, serta keragaan pegawai di Politeknik KP Bitung
3. ***Bab II Perencanaan Kinerja***, pada bab ini uraian singkat tentang, Rencana Kerja Tahunan, dan Penetapan kinerja Politeknik KP Bitung TW I Tahun 2026 serta Pengukuran Kinerja.
4. ***Bab III Akuntabilitas Kinerja***, bab ini dijelaskan hasil capaian kinerja dari indikator-indikator kinerja yang telah diuraikan pada bab sebelumnya disertai beberapa capaian indikator kinerja lainnya
5. ***Bab IV Penutup***, bab ini berisi uraian singkat terkait Kesimpulan, Permasalahan dan Rekomendasi



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, serta program dan kegiatan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.

Dalam pelaksanaannya, Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung tidak menyusun Renstra tersendiri. Arah kebijakan, program, dan kegiatan yang dilaksanakan sepenuhnya mengacu serta selaras dengan Renstra Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan sebagai unit eselon I pembina, serta Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai kementerian teknis yang menaungi.

Dengan mengacu pada Renstra BPPSDMKP dan KKP, Politeknik KP Bitung memastikan bahwa seluruh perencanaan program pendidikan, pelatihan, pengembangan SDM, serta dukungan manajemen berjalan selaras dengan arah pembangunan kelautan dan perikanan nasional. Sasaran kinerja, indikator kinerja utama (IKU), serta target tahunan yang ditetapkan merupakan turunan langsung dari sasaran strategis BPPSDMKP dan KKP.

Melalui mekanisme tersebut, Politeknik KP Bitung tetap memiliki arah pembangunan yang jelas, terukur, dan terintegrasi, meskipun tidak memiliki dokumen Renstra yang berdiri sendiri, sehingga mendukung pencapaian tujuan strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan secara efektif dan akuntabel.

1) *Visi dan Misi Politeknik KP Bitung*

a. Misi

Visi dan Misi Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung mengacu serta merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Rencana Strategis Eselon I, yaitu Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, yang selaras dengan Visi dan Misi Kementerian Kelautan dan Perikanan.



Sebagai Unit Pelaksana Teknis di lingkungan BPPSDMKP, Politeknik KP Bitung tidak menetapkan visi dan misi secara mandiri, melainkan mengikuti serta mendukung visi pembangunan kelautan dan perikanan nasional sebagaimana tertuang dalam Renstra Eselon I. Visi tersebut menjadi arah dalam penyelenggaraan pendidikan vokasi kelautan dan perikanan yang unggul, profesional dan berdaya saing.

Visi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2025–2029 adalah “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045.” Rumusan ini mencerminkan aspirasi nasional untuk menempatkan Indonesia sebagai negara maju yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan menjelang satu abad kemerdekaan. Pembangunan sumber daya manusia ditempatkan sebagai prioritas utama yang menjadi fondasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan, dan ketahanan bangsa di tengah perubahan global yang cepat. Sebagai kementerian yang memiliki mandat strategis, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menegaskan komitmen dalam mendukung pencapaian visi nasional tersebut. Untuk periode 2025–2029, KKP merumuskan visi “Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan sebagai Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan untuk Mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045.” Visi ini menekankan bahwa keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan bukan hanya menjadi pilar ekonomi nasional, melainkan juga instrumen strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir serta memperkuat basis ekonomi biru Indonesia. Sejalan dengan visi nasional dan kementerian, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDMKP) merumuskan visi spesifik, yaitu “Terwujudnya SDM Kelautan dan Perikanan yang Inovatif, Kompeten, dan Berdaya Saing untuk mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan sebagai Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan .” Visi tersebut menegaskan peran fundamental BPPSDMKP dalam membangun kapasitas manusia yang mampu menjawab tantangan kontemporer sektor kelautan dan perikanan. SDM yang inovatif akan mendorong lahirnya kreativitas serta adaptasi terhadap dinamika perubahan.



SDM yang dimaksud adalah SDM pelaku usaha yang inovatif dan berdaya saing serta SDM calon tenaga kerja yang kompeten yang akan memastikan relevansi - 35 - keterampilan dengan kebutuhan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja (DUDIKA). SDM yang berdaya saing memperkokoh posisi Indonesia dalam arena global yang sarat kompetisi. Landasan hukum visi BPPSDMKP tertuang dalam Pasal 33 Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2025, yang mengamanatkan fungsi strategis badan meliputi: (1) penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program penyuluhan serta pengembangan SDM kelautan dan perikanan; (2) pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan SDM KP; (3) pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan SDM KP; (4) pelaksanaan administrasi badan; dan (5) fungsi lain sesuai penugasan Menteri. Fungsi ini menjadi instrumen pengintegrasian penyuluhan, pendidikan, pelatihan, serta standardisasi dan sertifikasi ke dalam sistem pembangunan nasional yang berorientasi pada kualitas SDM. Peran BPPSDM dalam mendukung keberhasilan kebijakan Blue Economy dilakukan dalam upaya menyiapkan SDM kelautan dan perikanan yang kompeten dan berdayasaing sebagai calon tenaga kerja serta pelaku usaha kelautan dan perikanan yang inovatif dan berdayasaing. Peran BPPSDMKP dilakukan melalui kegiatan penyuluhan diarahkan untuk memberikan pendampingan kepada pelaku usaha, menumbuhkembangkan kelompok pelaku usaha, pendampingan kelembagaan ekonomi masyarakat lainnya seperti koperasi, gabungan kelompok (Gapokkan) dengan terus meningkatkan kesadaran untuk menjaga keberlanjutan sumberdaya kelautan dan perikanan. Pendidikan vokasi menjadi jalur strategis untuk regenerasi penerus sebagai pelaku usaha KP yang inovatif, kompeten dan tumbuh menjadi pelaku wirausaha muda yang memiliki pengetahuan komprehensif (pelaku usaha kelautan dan perikanan milenial). Disamping itu, pendidikan vokasi juga didorong untuk menyiapkan lulusan siap kerja yang selaras dengan kebutuhan industri; pelatihan dirancang untuk memperkuat keterampilan teknis, manajerial, dan sosial-kultural bagi pelaku utama/usaha, calon tenaga kerja serta aparatur yang berintegritas; standardisasi dan sertifikasi memastikan pengakuan kompetensi yang berlaku di tingkat nasional maupun internasional. Rumusan visi BPPSDMKP tidak



hanya sekadar turunan dari visi nasional dan kementerian, tetapi juga representasi strategi pembangunan SDM kelautan dan perikanan yang terintegrasi, berorientasi penciptaan - 36 - pasar dan penyiapan tenaga kerja kompeten, serta berbasis daya saing global. Visi ini sekaligus menjadi pijakan utama dalam penyusunan misi, tujuan, serta arah kebijakan yang dituangkan dalam Renstra BPPSDMKP 2025–2029, berorientasi pada transformasi SumberDaya Manusia KP sebagai motor penggerak ekonomi biru yang inklusif, produktif, dan berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045.

b. Misi

KKP mendukung Misi Presiden dan Wakil Presiden melalui tujuh dari delapan Asta Cita, dengan fokus pada Misi Asta Cita ke-2, 5, dan 8. Misi tersebut disusun untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan yang dirumuskan sebagai berikut:

1. “Menjaga Keberlanjutan Ekosistem dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan” yang melaksanakan Asta Cita 2 dan 8;
2. “Mengembangkan Sektor Kelautan dan Perikanan Sebagai Penggerak Utama Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan” yang melaksanakan Asta Cita 2, 3, 5, dan 6;
3. “Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan” yang melaksanakan Asta Cita 4; dan
4. “Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Efektif dan Berkualitas” yang melaksanakan Asta Cita 7

Dalam melaksanakan misi KKP ke-3 yaitu “Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Kelautan dan perikanan”. Dalam dukungan terhadap pelaksanaan misi tersebut, BPPSDMKP menetapkan misi yaitu “Mewujudkan SDM Kelautan dan Perikanan yang Inovatif, Kompeten, dan Berdaya Saing ditingkat Nasional dan Internasional”

2) Tujuan

Untuk mewujudkan Misi BPPSDM Tahun 2025-2029 disusun tujuan yaitu “Meningkatnya kapasitas dan kompetensi SDM KP yang Inovatif, Kompeten dan Berdaya Saing” dengan indikator meningkatnya meningkatnya kapasitas dan



kompetensi SDM KP dari 70 pada tahun 2025 menjadi 78 pada tahun 2029. Fokus utama tujuan strategis terletak pada peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia yang inovatif, kompeten, dan berdaya saing. Pencapaian tujuan ini diharapkan mampu mendorong tumbuhnya pelaku usaha baru yang inovatif dan berdaya saing, kelembagaan kelompok - 37 - pelaku usaha yang kuat dan mandiri serta menghasilkan calon wirausaha muda baru yang berlatar belakang pendidikan serta menjawab kebutuhan calon tenaga kerja melalui adanya keterhubungan lebih kuat antara dunia pendidikan dan pelatihan dengan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja (DUDIKA). Selain itu, tujuan juga diarahkan untuk memastikan keberlanjutan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3) Sasaran Kegiatan

Sasaran kegiatan merupakan instrumen penting dalam perencanaan strategis, yang berfungsi untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja. Sasaran Kegiatan ini merupakan derivasi dari tujuan kegiatan.

Sasaran Kegiatan Politeknik KP Bitung sesuai Rancangan Indikator dan Target Kinerja Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target 2025 - 2029				
		Kegiatan No.	Uraian	2025	2026	2027	2028	2029
Pendidikan Kelautan dan Perikanan	Terselenggaranya Pendidikan Vokasi Kelautan dan Perikanan Yang Kompeten	1	Peserta pendidikan kelautan dan perikanan Politeknik KP Bitung yang terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri atau Dunia Kerja (Orang)	126	153	127	129	153
		2	Jumlah lulusan Politeknik KP Bitung (Orang)	148	170	148	148	170
		3	Peserta pendidikan vokasi kelautan dan perikanan Politeknik KP Bitung yang kompeten (Orang)	495	495	495	495	495
		4	Nilai PNBP satker Politeknik KP Bitung (Rp. Miliar)	0,474	0,474	0,474	0,474	0,474
		5	Kerjasama Politeknik KP Bitung yang disepakati (Kesepakatan)	2	2	2	2	2
		6	Persentase lulusan Politeknik KP Bitung yang bersertifikasi kompetensi (%)	100	100	100	100	100
		7	Persentase anak pelaku utama yang diterima sebagai peserta didik baru di Politeknik KP Bitung (%)	100	100	100	100	100
	Tersedianya ilmu pengetahuan dan teknologi untuk	8	Kajian pendidikan tinggi kelautan dan perikanan Politeknik KP Bitung (Paket)	3	4	4	4	4



Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target 2025 - 2029				
		Kegiatan No.	Uraian	2025	2026	2027	2028	2029
	pendidikan tinggi kelautan dan perikanan	9	Pengabdian pendidikan tinggi kelautan dan perikanan Politeknik KP Bitung (kelompok)	1	3	3	3	3
	Terselenggaranya tata kelola pendidikan kelautan dan perikanan	10	Kelembagaan publik pendidikan kelautan dan perikanan yang terakreditasi pada Politeknik KP Bitung (Lembaga)	1	1	1	1	1
		11	Tenaga pendidik kelautan dan perikanan Politeknik KP Bitung yang tersertifikasi (Orang)	35	35	35	35	35
	Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan kelautan dan perikanan yang terstandar	12	Peralatan dan Mesin Serta Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi Bidang Pendidikan Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	0	2	2	2	2
		13	Prasarana Pendidikan Menengah dan Tinggi Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	0	1	1	1	1
	Dukungan Manajemen dan pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPPSDMKP	14	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Politeknik KP Bitung (%)	85	85	85	85	85
		15	Penilaian Mandiri SAKIP Politeknik KP Bitung (Nilai)	81	81,5	82	82,5	83
		16	Indeks Profesionalitas ASN Politeknik KP Bitung (Indeks)	84	85	86	87	88
		17	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Politeknik KP Bitung (%)	80	80	80	80	80
		18	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Politeknik KP Bitung (%)	80	80	80	80	80
		19	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Politeknik KP Bitung (Nilai)	92	92	92	92	92
		20	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Politeknik KP Bitung (Nilai)	71,5	71,5	71,5	71,5	71,5
		21	Persentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lingkup Politeknik KP Bitung (%)	100	100	100	100	100

4) Potensi dan Permasalahan

a. Potensi

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan 17.504 pulau dan luas perairan laut 5,8 juta km² (terdiri dari luas laut teritorial 0,3 juta km², luas perairan kepulauan 2,95 juta km², dan luas ZEE Indonesia 2,55 juta km²). Secara geopolitik Indonesia memiliki peran yang sangat strategis karena berada di antara benua Asia dan Australia, serta diantara Samudera



Pasifik dan Samudera Hindia, menempatkan Indonesia sebagai “poros maritim” dunia dalam konteks perdagangan global (the global supply chain system) yang menghubungkan kawasan Asia-Pasifik dengan Australia. Sebagai negara maritim terbesar di dunia, Indonesia memiliki kekayaan alam sangat besar dan beragam, baik berupa SDA terbaharukan (perikanan, terumbu karang, padang lamun, hutan mangrove, rumput laut, dan produk- produk bioteknologi), jasa-jasa kelautan, dan sumber keragaman hayati lainnya.

Potensi Kelautan dan Perikanan, sebagaimana Kota Bitung adalah berada pada provinsi Sulawesi Utara yang tepat berada di bibir Samudera Pasifik merupakan salah satu pintu bagi Indonesia.

Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung merupakan salah satu institusi pendidikan vokasi strategis di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan yang berperan penting dalam pengembangan sumber daya manusia di sektor maritim Indonesia. Berlokasi di Kota Bitung, Sulawesi Utara yang dikenal sebagai salah satu pusat kegiatan perikanan nasional politeknik ini memiliki potensi besar dalam mendukung pembangunan ekonomi berbasis kelautan.

Sebagai lembaga pendidikan vokasi, Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung menitikberatkan pada penguasaan keterampilan teknis dan praktik lapangan. Kurikulum yang diterapkan dirancang berbasis kompetensi dan disesuaikan dengan kebutuhan industri, sehingga lulusannya siap kerja dan mampu bersaing di dunia usaha maupun industri perikanan.

Potensi utama politeknik ini terletak pada bidang keahlian yang relevan dengan kekayaan sumber daya laut Indonesia, seperti penangkapan ikan, mekanisasi perikanan, dan pengolahan hasil perikanan. Program-program tersebut mendukung pengelolaan sumber daya laut secara optimal dan berkelanjutan, sekaligus meningkatkan nilai tambah produk perikanan.

Selain itu, Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung juga memiliki fasilitas pendukung yang memadai, seperti kapal latih, laboratorium, hingga teknologi pengolahan hasil perikanan. Fasilitas ini memungkinkan mahasiswa untuk melakukan praktik secara langsung, sehingga meningkatkan kualitas keterampilan dan pengalaman kerja sebelum terjun ke dunia profesional.

Dalam aspek penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, Politeknik KP Bitung turut berkontribusi dalam pengembangan inovasi di bidang kelautan dan



perikanan. Kegiatan riset terapan dan pendampingan masyarakat pesisir menjadi bagian penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendukung pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan.

Lebih jauh lagi, dalam rencana strategisnya, Politeknik KP Bitung diarahkan untuk meningkatkan daya saing global melalui pengembangan teknologi, inovasi, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Hal ini menunjukkan bahwa Politeknik KP Bitung memiliki potensi besar sebagai pusat unggulan pendidikan maritim yang mampu mendukung visi Indonesia sebagai poros maritim dunia.

Dengan berbagai keunggulan tersebut, Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung tidak hanya menjadi lembaga pendidikan, tetapi juga motor penggerak pembangunan sektor kelautan dan perikanan, baik di tingkat regional maupun nasional.

b. Permasalahan

Isu utama pembangunan wilayah nasional adalah masih besarnya kesenjangan antarwilayah khususnya kesenjangan antar Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan kawasan Timur Indonesia (KTI). Dalam lima tahun mendatang (2020 – 2024), arah kebijakan utama pembangunan wilayah nasional difokuskan pada upaya mempercepat pengurangan kesenjangan pembangunan antarwilayah dengan mendorong transformasi dan akselerasi pembangunan wilayah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, maret 2022 jumlah penduduk miskin Indonesia mencapai 22.16 juta orang, dimana sekitar 68% diperkirakan tinggal di wilayah pesisir. Kondisi ini menggambarkan tentang kondisi sebagian pelaku usaha perikanan Indonesia yang masih terbelunggu oleh kemiskinan yang merupakan persoalan kompleks dan bersifat multidimensional sehingga membutuhkan pendekatan komprehensif untuk menyelesaikannya.

Permasalahan sektor perikanan terkait dengan ketersediaan tenaga kerja yang siap pakai dalam dunia usaha dan dunia industri, sebagai bentuk kesiapan penyelenggaraan pendidikan di lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam mencetak SDM yang siap pakai dan mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung menghadapi berbagai tantangan dalam menjalankan perannya sebagai penghasil sumber daya manusia unggul di bidang kelautan dan perikanan. Permasalahan ini



muncul baik dari faktor internal maupun eksternal yang memengaruhi kualitas pendidikan dan daya saing lulusan.

Salah satu permasalahan utama adalah keterbatasan fasilitas dan sarana praktik yang harus terus mengikuti perkembangan teknologi industri perikanan modern. Perubahan teknologi yang cepat, seperti penggunaan alat tangkap ramah lingkungan dan sistem pengolahan berbasis digital, menuntut pembaruan peralatan secara berkala. Namun, keterbatasan anggaran sering kali menjadi kendala dalam pemenuhan kebutuhan tersebut.

Permasalahan lain adalah minat generasi muda terhadap sektor kelautan dan perikanan yang masih relatif rendah dibandingkan bidang lain. Hal ini dipengaruhi oleh persepsi bahwa pekerjaan di sektor ini memiliki risiko tinggi dan kurang menjanjikan, sehingga berdampak pada jumlah pendaftar dan kualitas input mahasiswa.

Dari sisi sumber daya manusia, peningkatan kapasitas dosen dan tenaga pendidik juga menjadi tantangan tersendiri. Dosen dituntut tidak hanya memiliki kompetensi akademik, tetapi juga pengalaman praktis yang relevan dengan industri. Oleh karena itu, diperlukan pelatihan berkelanjutan serta kerja sama dengan dunia industri untuk meningkatkan kualitas pengajaran.

Di sisi eksternal, Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung juga menghadapi tantangan dalam membangun kemitraan yang kuat dengan industri perikanan dan sektor terkait. Kolaborasi yang belum optimal dapat membatasi peluang magang, penelitian terapan, serta penyerapan lulusan di dunia kerja.

Selain itu, isu keberlanjutan sumber daya laut juga menjadi tantangan besar. Penurunan stok ikan akibat overfishing dan perubahan iklim memengaruhi relevansi praktik lapangan dan kegiatan penelitian. Institusi ini dituntut untuk beradaptasi dengan pendekatan pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan.

Dengan berbagai permasalahan tersebut, Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung perlu melakukan inovasi dan penguatan strategi, baik dalam pengelolaan pendidikan, peningkatan fasilitas, maupun kerja sama dengan berbagai pihak. Upaya ini penting agar politeknik tetap mampu menghasilkan lulusan yang kompeten dan berdaya saing tinggi di sektor kelautan dan perikanan.



c. Rencana Kerja Tahunan

Rencana Kerja Tahun 2026 Politeknik Kelautan dan Perikanan (KP) Bitung disusun sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pembangunan sumber daya manusia kelautan dan perikanan. Rencana kerja ini mengacu pada kebijakan strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan serta rencana strategis Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM KP), yang menitikberatkan pada peningkatan kualitas pendidikan vokasi, penguatan kompetensi sumber daya manusia, serta dukungan manajemen pendidikan yang efektif dan akuntabel.

Dalam Tahun Anggaran 2026, Politeknik KP Bitung melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang didukung oleh alokasi anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan, peningkatan kompetensi peserta didik, penguatan sarana dan prasarana pendidikan, serta pelaksanaan kegiatan dukungan manajemen dan operasional perkantoran.

Secara umum, rencana kerja Politeknik KP Bitung tahun 2026 difokuskan pada beberapa kegiatan utama, antara lain penyelenggaraan proses pembelajaran bagi taruna/taruni, pelaksanaan praktik kerja lapangan dan praktik laboratorium, peningkatan kapasitas dosen dan tenaga kependidikan, serta pengembangan kurikulum berbasis kompetensi sesuai kebutuhan sektor kelautan dan perikanan. Selain itu, kegiatan pembinaan karakter, kedisiplinan, dan kewirausahaan bagi peserta didik juga menjadi bagian penting dalam mendukung terciptanya lulusan yang profesional dan berdaya saing.

Dari sisi dukungan manajemen, anggaran tahun 2026 juga dialokasikan untuk kegiatan pengelolaan keuangan, pengelolaan barang milik negara, penguatan sistem akuntabilitas kinerja, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung tata kelola organisasi yang transparan dan akuntabel. Pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, seperti ruang kelas, laboratorium, asrama, serta fasilitas praktik juga menjadi prioritas agar proses pembelajaran dapat berjalan secara optimal.

Dengan adanya perencanaan kerja dan dukungan anggaran DIPA pada Tahun 2026 sebesar Rp. 20.897.674.000 diharapkan Politeknik KP Bitung dapat



terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan vokasi kelautan dan perikanan, menghasilkan lulusan yang kompeten, serta mendukung pembangunan sektor kelautan dan perikanan secara berkelanjutan.

Tabel Pagu Anggaran Politeknik KP Bitung Tahun 2026

No	Program/Sasaran/Kegiatan	Volume	Pagu
1	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi		7.184.769.000
2	Pendidikan Kelautan dan Perikanan		7.184.769.000
3	Persentase Lulusan Pendidikan Kelautan dan Perikanan Kompeten yang Terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri dan/atau Dunia Kerja (DUDIKA)	Orang	
4	Akreditasi Lembaga	Lembaga	5.000.000
5	Akreditasi Lembaga dan/atau Program Studi Pendidikan Kelautan dan Perikanan	Lembaga	5.000.000
6	Sertifikasi Profesi dan SDM	Orang	5.000.000
7	Sertifikasi Profesi dan SDM Pendidikan Kelautan dan Perikanan	Orang	5.000.000
8	Pendidikan Vokasi Bidang Pertanian, Kelautan, dan Perikanan	Orang	7.149.769.000
9	Peserta Pendidikan Vokasi Kelautan dan Perikanan Yang Kompeten	Orang	7.149.769.000
10	Penelitian dan Pengembangan Modeling	Paket	25.000.000
11	Ilmu Pengetahuan atau Teknologi Pendidikan Tinggi yang Diterapkan kepada Masyarakat	Masyarakat	25.000.000
12	Program Dukungan Manajemen		13.712.905.000
13	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan		13.712.905.000
14	Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK BPPSDMKP		
15	Indeks Profesionalitas ASN BPPSDMKP		
16	Penilaian Mandiri SAKIP BPPSDMKP		
17	Nilai Maturitas Struktur dan Proses SPIP BPPSDMKP		

Dalam upaya meningkatkan tata kelola keuangan yang efektif, Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung secara berkelanjutan melakukan revisi anggaran yang berorientasi pada efisiensi. Revisi ini menjadi bagian dari strategi institusi untuk memastikan bahwa setiap alokasi dana memberikan manfaat maksimal terhadap pencapaian kinerja organisasi.

Pada tahap awal pelaksanaan anggaran, alokasi dana cenderung disusun secara komprehensif untuk mendukung seluruh program kerja. Namun, dalam realisasinya, dilakukan evaluasi berkala yang mengidentifikasi adanya potensi



penghematan pada beberapa pos belanja, seperti perjalanan dinas, kegiatan seremonial, dan belanja operasional non-prioritas. Hasil evaluasi ini menjadi dasar dilakukannya revisi anggaran dengan mengalihkan dana ke kegiatan yang lebih strategis.

Revisi anggaran berbasis efisiensi juga terlihat pada optimalisasi penggunaan sarana dan prasarana. Kegiatan yang sebelumnya direncanakan secara terpisah mulai dikonsolidasikan untuk mengurangi biaya, misalnya melalui penggabungan pelatihan, penggunaan fasilitas secara bersama, serta pemanfaatan teknologi digital untuk menekan biaya operasional.

Selain itu, efisiensi dilakukan melalui penyesuaian volume kegiatan tanpa mengurangi output yang diharapkan. Misalnya, pengurangan jumlah kegiatan fisik yang digantikan dengan metode daring atau hybrid, sehingga biaya konsumsi, transportasi, dan akomodasi dapat ditekan secara signifikan.

Dalam beberapa periode, kebijakan efisiensi juga dipengaruhi oleh arahan pemerintah pusat yang mendorong penghematan anggaran negara. Hal ini mengakibatkan adanya pemotongan pagu atau refocusing anggaran, sehingga institusi perlu melakukan penyesuaian cepat melalui revisi anggaran agar tetap dapat menjalankan program prioritas.

Proses revisi dilakukan secara sistematis dengan mempertimbangkan skala prioritas, analisis kebutuhan riil, serta capaian kinerja. Dengan demikian, efisiensi tidak hanya berorientasi pada pengurangan anggaran, tetapi juga pada peningkatan kualitas belanja.

B. Perjanjian Kinerja

Dalam upaya untuk menjamin tercapainya sasaran dan target secara optimal dan tepat waktu, visi dan misi Politeknik KP Bitung harus menjadi acuan sekaligus landasan penyusunan strategi. Berdasarkan, visi dan misi tersebut selanjutnya dirumuskan sasaran Kegiatan Politeknik KP Bitung. Perjanjian Kinerja awal ditandatangani oleh Direktur dan Kepala Pusat Pendidikan KP pada tanggal 6 Januari 2026;

Selanjutnya, Sasaran Kegiatan Politeknik KP Bitung tahun 2025 yang telah ditetapkan, dijabarkan ke dalam indikator kinerja dengan target kinerja. Lima Sasaran Kegiatan Politeknik KP Bitung diwujudkan oleh 16 Indikator



Kinerja Utama dengan rincian dan target tahun 2025 revisi terakhir sbb:
PK Politeknik KP Bitung tahun 2026 sebagaimana pada Tabel berikut Tabel Perjanjian Kinerja Politeknik KP Bitung Tahun 2026

No	Indikator	Target Tahun 2026
1	Lulusan Politeknik KP Bitung yang terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri dan/atau Dunia Kerja (orang)	125
2	Jumlah lulusan Politeknik KP Bitung (orang)	169
3	Jumlah kerjasama Politeknik KP Bitung di tahun berjalan (kesepakatan)	2
4	Persentase lulusan Politeknik KP Bitung yang bersertifikasi kompetensi (%)	100
5	Kajian pendidikan tinggi kelautan dan perikanan Politeknik KP Bitung (Kajian)	3
6	Kelompok masyarakat yang mengadopsi ilmu pengetahuan dan teknologi di Politeknik KP Bitung (kelompok)	2
7	Jumlah pendidik Politeknik KP Bitung yang lulus sertifikasi profesi (Orang)	5
8	Penilaian Mutu Pendidikan Tinggi Kelautan dan Perikanan (%)	79
9	Persentase Sarana Prasarana Pendidikan KP yang ditingkatkan kapasitasnya di Politeknik KP Bitung (%)	80
10	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Politeknik KP Bitung (%)	86
11	Penilaian Mandiri SAKIP Politeknik KP Bitung (Nilai)	82
12	Indeks Profesionalitas ASN Politeknik KP Bitung (Indeks)	85
13	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BPPSDM KP (Nilai)	71
14	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Politeknik KP Bitung (%)	77
15	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Politeknik KP Bitung (Nilai)	92,1
16	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Politeknik KP Bitung (Nilai)	71,75



Tabel Data Anggaran

No	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1	Pendidikan Kelautan dan Perikanan	7.184.769.000
2	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPPSDMKP	13.712.905.000
Total Anggaran Politeknik KP Bitung Tahun 2026		20.897.674.000

C. Pengukuran Kinerja

1. Teknik Pengukuran Kinerja

Pengukuran capaian kinerja Politeknik KP Bitung TW I Tahun 2026, dilakukan dengan membandingkan antara data target dan realisasi IKU akan diperoleh indeks capaian IKU. Penghitungan indeks capaian IKU perlu memperhitungkan jenis polarisasi IKU yang berlaku yaitu maximize, minimize, dan stabilize. Ketentuan penetapan indeks capaian IKU adalah:

Angka maksimum adalah 120;

Angka minimum adalah 0;

Formula penghitungan indeks capaian IKU untuk setiap jenis polarisasi adalah berbeda;

Pengukuran kinerja dilakukan dengan mengacu kepada Manual IKU pada masing-masing Indikator. Adapun status Indeks capaian IKU adalah sebagai berikut:

Legend

	110 - 120 (Istimewa)
	90 - 110 (Baik)
	70 - 90 (Cukup)
	50 - 70 (Kurang)
	0 - 50 (Sangat Kurang)

Gambar Indikator Penilaian Capaian Kinerja



2. Metode Pengukuran Kinerja

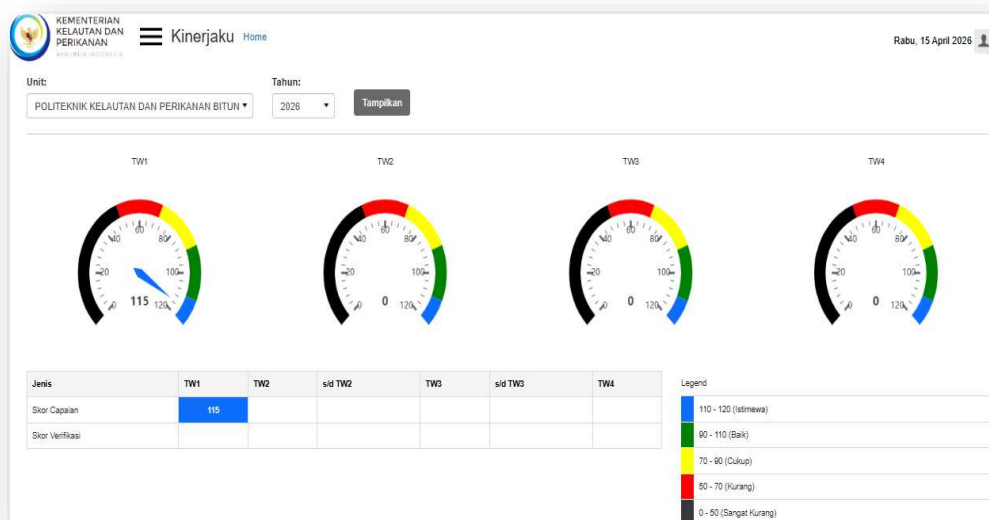
Metode pengukuran kinerja lingkup Politeknik KP Bitung dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali (triwulanan), yaitu pada bulan Maret (B03), Juni (B06), September (B09) dan Desember (B12). Selaku pihak yang bertanggungjawab dalam pengukuran, telah ditugaskan kepada Tim Kinerja Politeknik KP Bitung yang ditetapkan melalui Surat Direktur Politeknik KP Bitung Nomor: B.84/POLTEK.BTG/KP.440/I/2025 tentang Penunjukan Tim Pengelolaan Kinerja Tahun 2025 pada Politeknik KP Bitung. Keanggotaan Tim Kinerja terdiri dari pejabat dan staf yang mewakili semua Subbagian dan Urusan lingkup Politeknik KP Bitung. Dalam pelaksanaannya, capaian kinerja triwulanan dipantau oleh Tim yang menjadi penanggung jawab kegiatan, selanjutnya penanggung jawab kegiatan melaporkannya kepada Direktur Politeknik KP Bitung. Berdasarkan laporan unit kerja penanggung jawab kegiatan, Direktur c.q. Sub Bagian Umum merangkum seluruh hasil yang dicapai dan melakukan evaluasi untuk mengendalikan pencapaian pelaksanaan program/ kegiatan secara keseluruhan.



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Prestasi Indikator Kinerja Utama Triwulan I Tahun 2026

Pengukuran capaian kinerja Politeknik KP Bitung tahun TW I 2026 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja utama *key performance indicator* pada masing-masing perspektif. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak berbasis Logical Frame Work dari Kementerian Kelautan Perikanan, yaitu pada <http://kinerjaku.kkp.go.id>. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data capaian kinerja Politeknik KP Bitung di tingkat korporat TW I Tahun 2026 sebesar 115%, sebagaimana dashboard kinerjaku sebagai berikut:



Capaian kinerja TW I Tahun 2026 Politeknik KP Bitung



B. Evaluasi Dan Analisis Kinerja

Pelaksanaan evaluasi dan analisis kinerja dilakukan melalui pengukuran kinerja dengan menggunakan formulir pengukuran kinerja sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Politeknik KP Bitung. Pengukuran kinerja dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang didasarkan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah diidentifikasi agar sasaran-sasaran strategis dan tujuan strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Peta Strategi Politeknik KP Bitung yang menjadi kontrak kinerja pada Tahun 2024 dapat tercapai.

Tabel Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026

No	Indikator	Target Tahun 2026	Target TW I	Capaian TW I	Capaian (%)
1	Lulusan Politeknik KP Bitung yang terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri dan/atau Dunia Kerja (orang)	125	7	16	120
2	Jumlah lulusan Politeknik KP Bitung (orang)	169			
3	Jumlah kerjasama Politeknik KP Bitung di tahun berjalan (kesepakatan)	2			
4	Persentase lulusan Politeknik KP Bitung yang bersertifikasi kompetensi (%)	100			
5	Kajian pendidikan tinggi kelautan dan perikanan Politeknik KP Bitung (Kajian)	3			
6	Kelompok masyarakat yang mengadopsi ilmu pengetahuan dan teknologi di Politeknik KP Bitung (kelompok)	2			
7	Jumlah pendidik Politeknik KP Bitung yang lulus sertifikasi profesi (Orang)	5			



No	Indikator	Target Tahun 2026	Target TW I	Capaian TW I	Capaian (%)
8	Penilaian Mutu Pendidikan Tinggi Kelautan dan Perikanan (%)	79			
9	Persentase Sarana Prasarana Pendidikan KP yang ditingkatkan kapasitasnya di Politeknik KP Bitung (%)	80			
10	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Politeknik KP Bitung (%)	86	86	86	100
11	Penilaian Mandiri SAKIP Politeknik KP Bitung (Nilai)	82			
12	Indeks Profesionalitas ASN Politeknik KP Bitung (Indeks)	85			
13	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BPPSDM KP (Nilai)	71			
14	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Politeknik KP Bitung (%)	77	77	100	120
15	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Politeknik KP Bitung (Nilai)	92,1			
16	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Politeknik KP Bitung (Nilai)	71,75			



INDIKATOR KINERJA – 1

Lulusan Politeknik KP Bitung yang terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri dan/atau Dunia Kerja (orang)

Serapan lulusan di dunia kerja bidang kelautan dan perikanan adalah outcome atau hasil jangka panjang Politeknik KP Bitung yang memiliki fungsi sebagai penyelenggaraan pendidikan kelautan dan perikanan. Peserta didik yang telah selesai mengenyam pendidikan di Politeknik KP Bitung, mampu berpartisipasi dalam peningkatan kesejahteraan pelaku utama atau usaha bidang KP, baik untuk dirinya sendiri maupun lingkungan sekitarnya.

Peserta pendidikan kelautan dan perikanan Politeknik KP Bitung yang terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri atau Dunia Kerja (Orang), pada tahun 2026 ditargetkan sebanyak 125 orang untuk TW I ditargetkan sebanyak 7 orang.

Capaian IKU Lulusan Politeknik KP Bitung yang terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri dan/atau Dunia Kerja dapat dilihat pada table dibawah ini:

Sasaran Kegiatan 1 : Terselenggaranya Pendidikan Vokasi Kelautan dan Perikanan Yang Kompeten											
IKU 1 : Lulusan Politeknik KP Bitung yang terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri dan/atau Dunia Kerja (orang)											
Realisasi					2026				Rancangan Indikator dan Target Kinerja Tahun 2025-2029		
2021	2022	2023	2024	2025	Target	Capaian	% Capaian	% Kenaikan 2025-2026	Target 2029	% Capaian thd target 2029	
0	0	0	0	0	7	16	120%	0,00	153	50,89%	

Dari data diatas bisa dilihat bahwa target TW I IKU ini adalah 7 orang dan capaiannya yaitu 16 orang atau tingkat capaiannya 107 %, IKU ini merupakan IKU baru jadi tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, jika dibandingkan dengan rancangan indicator kinerja tahun 2029 dengan target 153 maka capaiannya 50,89%.

Keberhasilan pencapaian kinerja ini dipengaruhi oleh antara lain :

1. Langkah-langkah yang telah diambil oleh Politeknik KP Bitung agar target ini dapat tercapai pada Tahun 2025 yakni melalui pendekatan dengan beberapa perusahaan dengan menjalin MoU dengan Politeknik KP Bitung.
2. Program Vocational Goes to Actors Festival (VOGA Fest), yang diusung BPPSDMKP yang bertujuan menghubungkan para lulusan serta taruna



yang segera lulus, dengan perusahaan-perusahaan perikanan yang ada di dalam dan luar negeri.

3. Selain karena program networking, keahlian dan keterampilan para lulusan menjadi penunjang utama banyaknya lulusan diterima bekerja di kapal perikanan maupun perusahaan perikanan di luar negeri. Keterampilan dan keahlian dibuktikan dengan rentetan sertifikasi berstandar internasional yang dimiliki para lulusan.
4. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Unggul merupakan salah satu faktor penentu terpenting dalam mencapai keberhasilan Program dan Kebijakan Ekonomi Biru. Kualitas SDM harus mendapatkan prioritas utama untuk ditingkatkan dan dikembangkan.
5. dikarenakan masih terbukanya lapangan kerja bidang kelautan dan perikanan terutama bagi lulusan Poltek Kelautan dan Perikanan.
6. Sistem pendataan alumni yang update melalui aplikasi e-latar.
7. Kerja sama dan komunikasi baik yang dilakukan dengan Pelaku Dunia Industri
8. Reviu kurikulum yang rutin dilakukan oleh Pusdik yang disesuaikan dengan kondisi saat ini
9. Kompetensi yang sesuai antara lulusan di dunia industri dan
10. Ilmu yang didapat selama pendidikan dapat bermanfaat dalam membuka wirausaha atau bekerja di perusahaan.
11. Data serapan diperoleh melalui upaya penelusuran alumni yang dilakukan secara lebih intensif.

Kegiatan yang mendukung IKU antara lain :

1. membangun komunikasi dengan pihak – pihak luar, antara lain PDS, Jobstreet, dan Pusat lain di lingkup BPPSDM KP. Tujuannya adalah untuk mempermudah akses alumni satuan pendidikan KP untuk mencari pekerjaan yang sesuai dengan latar belakang ilmunya, dan menjembatani perusahaan untuk menemukan karyawan yang sesuai dengan budaya perusahaan;
2. menjalin komunikasi kepada alumni melalui media sosial untuk memberikan update informasi terkait lowongan perusahaan;
3. melakukan kerjasama dengan dunia usaha / dunia industri yang bertujuan



untuk membuka pintu penyerapan alumni lebih luas;

4. Kegiatan penelusuran lulusan, baik kunjungan langsung ke daerah asal lulusan, maupun secara online melalui WA Grup lulusan, dll.
5. Proses rekrutmen dan persiapan penempatan kerja di bidang KP / DuDi telah dimulai dari sebelum taruna-taruni lulus.
6. Proses Pendidikan di Politeknik KP Bitung diantaranya Kegiatan Kerja Praktik Akhir (KPA) mulai dari praktik sampai pada ujian akhir, kegiatan yudisium dan wisuda.

Efisiensi penggunaan sumberdaya Tenaga Pendidik dan Kependidikan merupakan unsur yang mendukung keterserapan lulusan. Disamping itu Kegiatan MOU dengan DU/DI juga memegang peran penting.

INDIKATOR KINERJA – 2

Jumlah lulusan Politeknik KP Bitung (Orang)

Lulusan Politeknik KP Bitung adalah peserta didik yang telah menyelesaikan pendidikan di Politeknik KP Bitung yang dibuktikan dengan surat keterangan lulus/ijazah pada tahun berjalan. Formulasi perhitungannya adalah Akumulasi jumlah peserta didik Politeknik KP Bitung yang lulus pada tahun berjalan. Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung secara konsisten menghasilkan lulusan yang kompeten dan siap memasuki dunia kerja pada sektor kelautan dan perikanan. Jumlah lulusan yang dihasilkan setiap tahun menunjukkan keberhasilan penyelenggaraan pendidikan vokasi yang berorientasi pada penguasaan kompetensi, keterampilan praktis, serta karakter disiplin dan profesional.

Lulusan Politeknik KP Bitung berasal dari berbagai program studi yang diselenggarakan, yaitu Teknik Penangkapan Ikan, Mekanisasi Perikanan, dan Teknik Pengolahan Produk Perikanan. Seluruh lulusan telah melalui proses pembelajaran berbasis praktik, uji kompetensi, serta pembekalan sertifikasi sesuai standar industri dan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri (DUDI). Peningkatan jumlah lulusan dari tahun ke tahun mencerminkan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Politeknik KP Bitung sebagai institusi pendidikan vokasi di bidang kelautan dan perikanan. Dengan capaian jumlah lulusan tersebut, Politeknik KP Bitung terus berkomitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, relevansi kompetensi lulusan, serta daya saing sumber daya



manusia kelautan dan perikanan guna mendukung pembangunan sektor kelautan dan perikanan nasional. Indikator Kinerja ini bertujuan untuk menggambarkan kontribusi Politeknik KP Bitung dalam rangka mendidik peserta didik sampai menyelesaikan pendidikan.

INDIKATOR KINERJA – 3

Jumlah kerjasama Politeknik KP Bitung di tahun berjalan (kesepakatan)

IKU Kerjasama Politeknik KP Bitung yang disepakati (Kesepakatan) merupakan indikator yang menunjukkan jumlah Kemitraan dan/atau Kerjasama yang dijalin dan/atau masih dilaksanakan antara Satuan Kerja Politeknik KP Bitung dengan pihak mitra. Perhitungan capaian indikator kinerja ini dihitung dari Jumlah kemitraan dan/atau kerjasama yang terjalin dan masih berlaku pada tahun berjalan.

Capaian IKU Kerja Sama Politeknik KP Bitung telah terlaksana sesuai dengan target yang disepakati. Sepanjang periode pelaksanaan, Politeknik KP Bitung secara konsisten memperkuat dan memperluas jejaring kemitraan strategis dengan berbagai pihak, baik dari unsur dunia usaha dan dunia industri (DUDI), instansi pemerintah, perguruan tinggi, maupun lembaga terkait lainnya.

Kerja sama yang terjalin difokuskan pada peningkatan mutu pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam mendukung peningkatan kompetensi mahasiswa, relevansi kurikulum dengan kebutuhan industri, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia. Implementasi kerja sama diwujudkan melalui kegiatan magang dan praktik kerja lapangan, kuliah tamu, penyelarasan kurikulum, penelitian terapan bersama, serta pengabdian kepada masyarakat yang melibatkan mitra kerja sama.

Seluruh perjanjian kerja sama yang disepakati telah ditindaklanjuti melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang terukur, dibuktikan dengan dokumen pendukung seperti nota kesepahaman (MoU), perjanjian kerja sama (PKS), serta laporan pelaksanaan kegiatan. Hal ini menunjukkan bahwa kerja sama tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas lulusan dan kinerja institusi.

Dengan tercapainya IKU kerja sama sesuai target yang telah ditetapkan, Politeknik KP Bitung menunjukkan komitmen dalam membangun sinergi berkelanjutan dengan para mitra guna mendukung visi institusi sebagai



perguruan tinggi vokasi yang unggul dan adaptif terhadap kebutuhan sektor kelautan dan perikanan.

INDIKATOR KINERJA – 4

Persentase lulusan Politeknik KP Bitung yang bersertifikasi kompetensi (%)

IKU Persentase lulusan Politeknik KP Bitung yang bersertifikasi kompetensi merupakan indikator yang menunjukkan jumlah peserta didik tingkat akhir yang telah tersertifikasi kompetensinya dalam rangka persiapan bekerja di bidang Kelautan dan perikanan. Perhitungan capaian indikator kinerja ini dihitung dari jumlah peserta didik tingkat akhir yang diusulkan mengikuti ujian sertifikasi kompetensi pada tahun berjalan dibanding dengan Jumlah peserta didik tingkat akhir yang lulus ujian sertifikasi kompetensi pada tahun berjalan. Indikator Kinerja ini bertujuan untuk menggambarkan kontribusi Politeknik KP Bitung dalam peningkatan kapasitas SDM KP melalui Pendidikan.

INDIKATOR KINERJA – 5

Kajian pendidikan tinggi kelautan dan perikanan Politeknik KP Bitung (Kajian)

Kajian pendidikan tinggi kelautan dan perikanan Politeknik KP Bitung adalah merupakan jumlah kajian atau hasil penelitian dari masing-masing satuan pendidikan, yang terkait langsung dengan program prioritas KKP. Program Prioritas KKP yaitu:

1. memperluas kawasan konservasi laut,
2. PIT berbasis kuota,
3. pengembangan perikanan budi daya di laut, pesisir, dan darat yang berkelanjutan,
4. pengawasan dan pengendalian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil,
5. pembersihan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan

Kajian Pendidikan Tinggi Kelautan dan Perikanan merupakan ukuran kinerja yang digunakan untuk menilai capaian dalam penyusunan kajian strategis sebagai dasar pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan vokasi di



bidang kelautan dan perikanan. IKU ini mencerminkan kemampuan unit kerja dalam menghasilkan kajian yang komprehensif, berbasis data, dan relevan dengan kebutuhan pembangunan sektor kelautan dan perikanan, serta selaras dengan arah kebijakan nasional dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Kajian pendidikan tinggi kelautan dan perikanan diarahkan untuk mendukung peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan, melalui analisis terhadap kurikulum, sistem pembelajaran, sumber daya manusia, sarana prasarana, serta keterkaitan dengan dunia usaha dan dunia industri (link and match). Selain itu, kajian ini juga berfungsi sebagai landasan dalam perumusan kebijakan, inovasi pendidikan, serta penguatan daya saing lulusan.

Dalam implementasinya, IKU ini diukur berdasarkan jumlah dan kualitas dokumen kajian yang dihasilkan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, serta pemanfaatannya dalam mendukung pengambilan keputusan dan perbaikan berkelanjutan di lingkungan institusi pendidikan kelautan dan perikanan.

Dengan demikian, pencapaian IKU Kajian Pendidikan Tinggi Kelautan dan Perikanan diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan pendidikan vokasi yang unggul, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan industri serta pembangunan kelautan dan perikanan yang berkelanjutan.

INDIKATOR KINERJA – 6

Kelompok masyarakat yang mengadopsi ilmu pengetahuan dan teknologi di Politeknik KP Bitung (kelompok)

Kelompok masyarakat yang mengadopsi ilmu pengetahuan dan teknologi di Politeknik KP Bitung adalah Pengabdian Pendidikan Tinggi Kelautan dan Perikanan adalah kegiatan pengabdian yang dilakukan dengan memberikan contoh langsung dan diuji cobakan oleh kelompok pelaku usaha dan pelaku pendukung di sektor kelautan dan perikanan

Kegiatan ini merupakan bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang mencakup pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada kelompok pelaku usaha dan pelaku pendukung. Dalam konteks kelautan dan perikanan, kegiatan pengabdian berfokus pada pemberdayaan masyarakat pesisir dan pengembangan sektor kelautan serta perikanan yang berkelanjutan



Acuannya yaitu Keputusan Kepala BPPSDMKP Nomor 719 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Terpusat pada Perguruan Tinggi Vokasi Lingkup BPPSDMKP.

INDIKATOR KINERJA – 7

Jumlah pendidik Politeknik KP Bitung yang lulus sertifikasi profesi (Orang)

Jumlah pendidik Politeknik KP Bitung yang lulus sertifikasi profesi adalah Pendidik adalah guru dan dosen pegawai profesional dari PNS/ASN KKP yang diberi tugas untuk melaksanakan pembelajaran di Satuan Pendidikan Kelautan dan Perikanan.

Sertifikasi Dosen (Serdos) adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk dosen sebagai pengakuan formal atas profesionalisme, kompetensi, dan kelayakan dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi.

Sertifikasi guru adalah proses pemberian sertifikat pendidik sebagai bukti formal pengakuan profesionalitas guru yang telah memenuhi standar kompetensi (pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional)

INDIKATOR KINERJA – 8

Penilaian Mutu Pendidikan Tinggi Kelautan dan Perikanan (%)

Penilaian Mutu Pendidikan Tinggi Kelautan dan Perikanan merupakan indikator yang menunjukkan persentase perolehan nilai mandiri terkait mutu satuan pendidikan pada tahun berjalan.

Akreditasi adalah kegiatan penilaian untuk menentukan program studi pada satuan pendidikan.

Akreditasi program studi adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan program studi.

Penilaian mutu pendidikan tinggi kelautan dan perikanan merupakan proses sistematis dan berkelanjutan dalam rangka menjamin terselenggaranya pendidikan yang berkualitas, relevan, dan berdaya saing. Penilaian ini dilakukan untuk mengukur tingkat pencapaian standar pendidikan tinggi, khususnya dalam mendukung pengembangan sumber daya manusia yang kompeten di sektor kelautan dan perikanan.

Proses penilaian mutu mencakup berbagai aspek, antara lain kurikulum, proses pembelajaran, kompetensi dosen dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, serta capaian lulusan. Selain itu, keterkaitan dengan dunia usaha



dan dunia industri (*link and match*) menjadi salah satu fokus utama dalam memastikan lulusan memiliki kesiapan kerja yang tinggi.

Penilaian mutu juga berfungsi sebagai instrumen evaluasi dalam mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan penyelenggaraan pendidikan. Hasil penilaian tersebut selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan, perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*), serta peningkatan akuntabilitas kinerja institusi pendidikan.

Dalam konteks pendidikan tinggi kelautan dan perikanan, penilaian mutu diarahkan untuk mendukung pengembangan pendidikan vokasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi, kebutuhan industri, serta isu keberlanjutan sumber daya kelautan. Dengan demikian, institusi pendidikan diharapkan mampu menghasilkan lulusan yang profesional, berintegritas, dan mampu berkontribusi dalam pembangunan sektor kelautan dan perikanan secara berkelanjutan.

INDIKATOR KINERJA – 9

Persentase Sarana Prasarana Pendidikan KP yang ditingkatkan kapasitasnya di Politeknik KP Bitung (%)

Persentase Sarana Prasarana Pendidikan KP yang ditingkatkan kapasitasnya di Politeknik KP Bitung adalah sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat atau media untuk mencapai maksud atau tujuan (seperti buku, komputer, simulator meubelair dll)

Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek, sistem dsb.), seperti jalan, jembatan, sistem pengelolaan limbah, sanitasi air, telekomunikasi, dll. Kapasitas adalah daya tampung, kemampuan, atau keluaran sesuatu dari suatu objek, tempat atau sistem dalam periode tertentu

Jumlah sarana prasarana yang ditingkatkan kapasitasnya sesuai dengan standar yaitu jumlah sarana prasarana yang diadakan/dipelihara oleh satuan pendidikan pada tahun berjalan sesuai dengan standar

Jumlah sarana prasarana yang akan ditingkatkan yaitu usulan rencana pengadaan/pemeliharaan yang akan dilaksanakan oleh satuan pendidikan KP pada tahun berjalan.



INDIKATOR KINERJA – 10

Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Politeknik KP Bitung (%)

Merupakan indikator yang menunjukkan jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang terbit pada periode Triwulan IV Tahun 2024 s.d. Triwulan III Tahun 2025 yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) oleh Politeknik KP Bitung.

Formula perhitungan:
$$\frac{\text{Jumlah rekomendasi Itjen yang telah tuntas ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen}} \times 100\%$$

Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Politeknik KP Bitung menunjukkan tingkat komitmen institusi dalam menindaklanjuti setiap temuan dan saran perbaikan yang diberikan. Rekomendasi hasil pengawasan tidak hanya dijadikan sebagai bahan evaluasi, tetapi juga diimplementasikan secara nyata dalam perbaikan tata kelola, peningkatan kualitas layanan pendidikan, serta penguatan sistem administrasi dan manajemen. Tingginya persentase pemanfaatan rekomendasi mencerminkan adanya sinergi yang baik antara pimpinan, unit kerja, dan seluruh sivitas akademika dalam upaya meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas kinerja Politeknik KP Bitung secara berkelanjutan.

Capaian IKU presentase rekomendasi asil pengawasan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel capaian IKU Presentase Rekomendasi Hasil Pengawasan

Sasaran Kegiatan 2 : Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan											
IKU 1 : Lulusan Politeknik KP Bitung yang terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri dan/atau Dunia Kerja (orang)											
Realisasi					2026				Rancangan Indikator dan Target Kinerja Tahun 2025-2029		
2021	2022	2023	2024	2025	Target	Capaian	% Capaian	% Kenaikan 2025-2026	Target 2029	% Capaian thd target 2029	
100	100	100	100	100	86	86	100%	100	85	101,17%	

Dari data diatas menunjukan capaian IKU presentase rekomendasi hasil pengawasan dimana realisasi TW I sebesar 86 dari target 86 atau tingkat ketercapaian sebesar 100%, jika dibandingkan dengan capaian tahun 2025 100% maka tingkat ketercapaiannya 100%, realisasi tahun 2024, 2023 dan 2022 dan 2021 sebesar 100%, jika dibandingkan dengan Rancangan Indikator dan Target Kinerja Tahun 2029 85% capaiannya sebesar 101,17%.



Kegiatan yang mendukung capaian IKU ini yaitu Tindak lanjut hasil audit dan pengawasan dengan melaksanakan penelaahan dan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan dari inspektorat secara tepat waktu dan terukur dan menyusun rencana aksi atas setiap rekomendasi pengawasan sebagai pedoman pelaksanaan perbaikan kinerja unit kerja terkait dan melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap progres penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan untuk memastikan efektivitas implementasi.

Faktor pendukung capaian IKU ini adalah adanya komitmen dari pimpinan Politeknik KP Bitung dalam menindaklanjuti setiap rekomendasi hasil pengawasan menjadi faktor utama keberhasilan pencapaian IKU, koordinasi antar unit kerja yang efektif kerja mempercepat proses penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan.

INDIKATOR KINERJA – 11

Penilaian Mandiri SAKIP Politeknik KP Bitung (Nilai)

Nilai PM SAKIP Unit Eselon I dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yaitu perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai PM SAKIP Unit kerja merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP yang ada di Unit kerja. Nilai PM SAKIP adalah nilai yang dikeluarkan dari hasil penilaian mandiri Inspektorat Mitra dari Unit Eselon I.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan suatu sistem manajemen kinerja yang terintegrasi dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah. SAKIP menggabungkan proses perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi, dan capaian kinerja secara sistematis dan berkelanjutan.

Penerapan SAKIP bertujuan untuk mendorong instansi pemerintah agar mampu menetapkan target kinerja yang jelas, terukur, dan berorientasi pada hasil (outcome), serta memastikan bahwa setiap penggunaan anggaran memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Dengan demikian, SAKIP



menjadi instrumen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean government*).

Dalam implementasinya, SAKIP mencakup beberapa komponen utama, yaitu perencanaan kinerja yang tertuang dalam rencana strategis dan perjanjian kinerja, pengukuran kinerja melalui indikator yang terukur, pelaporan kinerja dalam bentuk laporan kinerja (LKj), serta evaluasi dan revidi untuk menilai tingkat keberhasilan pencapaian kinerja.

Selain itu, SAKIP juga berperan dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik, karena hasil kinerja instansi dapat diakses dan dievaluasi oleh pemangku kepentingan. Melalui penerapan SAKIP yang optimal, diharapkan Politeknik KP Bitung mampu meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan.

INDIKATOR KINERJA – 12

Indeks Profesionalitas ASN Politeknik KP Bitung (indeks)

Indikator Indeks Profesionalitas ASN lingkup BPPSDM merupakan Indikator yang dibentuk seiring dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara.

Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat profesionalisme ASN dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi. Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dilakukan berdasarkan empat dimensi utama, yaitu kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan disiplin.

Pada aspek kualifikasi, ASN Politeknik KP Bitung telah memenuhi persyaratan pendidikan sesuai dengan jabatan yang diemban, baik tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan, sehingga mendukung pelaksanaan tridharma pendidikan vokasi kelautan dan perikanan secara optimal.

Pada aspek kompetensi, Politeknik KP Bitung secara berkelanjutan



mendorong peningkatan kapasitas ASN melalui pendidikan dan pelatihan, sertifikasi kompetensi, bimbingan teknis, serta pengembangan keprofesian berkelanjutan guna mendukung peningkatan kualitas layanan pendidikan dan tata kelola institusi.

Pada aspek kinerja, ASN Politeknik KP Bitung melaksanakan tugas berdasarkan perencanaan kinerja yang jelas dan terukur, yang dituangkan dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan dievaluasi secara periodik. Capaian kinerja ASN berkontribusi langsung terhadap pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) institusi.

Pada aspek disiplin, penerapan peraturan disiplin ASN dilaksanakan secara konsisten, termasuk kepatuhan terhadap jam kerja, kode etik, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai bagian dari upaya mewujudkan ASN yang berintegritas.

Secara keseluruhan, Indeks Profesionalitas ASN Politeknik KP Bitung menunjukkan kecenderungan yang positif dan mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, peningkatan mutu pendidikan vokasi, serta pencapaian kinerja institusi secara berkelanjutan.

INDIKATOR KINERJA – 13

Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BPPSDM KP (Nilai)

Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BPPSDM KP merupakan arsip yang tercipta dari kegiatan lembaga negara dan kegiatan yang menggunakan sumber dana negara merupakan memori, acuan, dan bahan pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan negara sehingga perlu dilakukan usaha penyelamatan secara terpadu, sistemik, dan komprehensif dengan mengukur tingkat pencipta arsip dalam menyelenggarakan kearsipan sesuai dengan prinsip, kaidah, standar kearsipan, dan peraturan perundang-undangan. Nilai pengawasan kearsipan internal adalah penilaian yang dilakukan untuk menilai seberapa baik pencipta arsip dalam menjalankan penyelenggaraan kearsipan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Audit kearsipan internal dilakukan oleh tim pengawas kearsipan internal untuk menilai pengelolaan arsip dinamis di lingkungan pencipta arsip yang memuat kondisi faktual, pemenuhan standar, rekomendasi, dan nilai pengawasan. Dasar hukum pengawasan kearsipan KKP



adalah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Nilai pengawasan kearsipan internal unit eselon I diperoleh dari nilai unit kearsipan II.

INDIKATOR KINERJA – 14

Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Politeknik KP Bitung (%)

Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah instrumen penting dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah yang dilaksanakan melalui proses pengadaan barang/jasa. Melalui RUP, pemerintah mengumumkan secara terbuka pemaketan pengadaan yang akan dilaksanakan oleh KKP. Pengukuran terhadap persentase RUP yang diumumkan pada SiRUP dapat merepresentasikan kualitas perencanaan PBJ di KKP.

Nilai ini didapatkan dari persentase nilai pengadaan barang/jasa yang diumumkan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dibandingkan dengan nilai pagu pengadaan suatu unit kerja mandiri (Satuan Kerja). Pagu pengadaan merupakan pagu program dikurangi belanja pegawai dan pagu non pengadaan. Adapun ketentuan mengenai Persentase Rencana Umum Pengadaan dijabarkan pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 11 Ayat (1).

Formula pengukuran IKU ini yaitu Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada SiRUP x 100% Pagu Pengadaan Barang/Jasa.

Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator ini.

Politeknik KP Bitung secara konsisten menyusun dan mengumumkan RUP PBJ melalui aplikasi SIRUP pada awal tahun anggaran dan melakukan pemutakhiran secara berkala apabila terdapat perubahan kebutuhan pengadaan. Seluruh paket pengadaan, baik pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultasi, maupun jasa lainnya, diumumkan secara terbuka melalui SIRUP sebagai bentuk komitmen terhadap prinsip transparansi,



akuntabilitas, dan efisiensi pengelolaan anggaran.

Pengumuman RUP PBJ pada SIRUP menjadi dasar pelaksanaan proses pengadaan barang/jasa yang tertib, terencana, dan sesuai jadwal, serta mendukung penguatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di lingkungan Politeknik KP Bitung.

Capaian IKU Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Politeknik KP Bitung dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel capaian IKU ersentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP

Sasaran Kegiatan 2 : Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan										
IKU 14 : Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Politeknik KP Bitung										
Realisasi					2026				Rancangan Indikator dan Target Kinerja Tahun 2025-2029	
2021	2022	2023	2024	2025	Target	Capaian	% Capaian	% Kenaikan 2025-2026	Target 2029	% Capaian thd target 2029
-	-	-	-	100	77	100	120%	-	85	117,64%

Tabel diatas menunjukan capaian Kinerja IKU Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Politeknik KP Bitung dimana dapat dilihat bahwa Politeknik KP Bitung memiliki capaian 100 dari target 77 atau tingkat ketercapaian 120%, jika dibandingkan dengan capaian tahun 2025 100 maka tidak memiliki kenaikan capaian, untuk tahun 2024, 2023, 2022, 2022, 2021 tidak memiliki target IKU ini, jika dibandingkan dengan target 2029 sebesar 85 memiliki capaian sebesar 117,64%.

Faktor pendukung capaian IKU ini adalah pengelolaan pengadaan barang dan jasa yang baik memastikan penyusunan dan mengumumkan RUP secara tepat waktu, ketersediaan SDM PBJ yang kompeten, keberadaan pejabat pembuat komitmen (PPK), pejabat pengadaan, dan pengelola PBJ yang memahami regulasi serta tata cara penginputan pada aplikasi SIRUP sangat menentukan kelengkapan dan ketepatan data RUP.

Kegiatan pendukung IKU ini adalah penyusunan dan penetapan Rencana Umum Pengadaan (RUP) dilakukan secara tepat waktu dan selaras dengan dokumen perencanaan dan penganggaran, seperti RKAKL dan DIPA. Kegiatan ini memastikan seluruh paket pengadaan telah teridentifikasi sejak awal tahun anggaran selain itu kegiatan pendukung IKU ini adalah input dan pengumuman



RUP pada aplikasi SIRUP dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang secara berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kegiatan ini mencakup pengisian data paket pengadaan secara lengkap, akurat, dan tepat waktu.

INDIKATOR KINERJA – 15

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Politeknik KP Bitung (Nilai)

Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga atas kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran dengan memperhatikan 8 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran.

Kategori Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dibagi menjadi 4 (empat), antara lain

- a. Sangat Baik, apabila nilai IKPA ≥ 95 ;
- b. Baik, apabila $89 \leq \text{nilai IKPA} < 95$;
- c. Cukup, apabila $70 \leq \text{nilai IKPA} < 89$; atau
- d. Kurang, apabila nilai IKPA < 70

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung merupakan ukuran kinerja yang digunakan untuk menilai kualitas pelaksanaan anggaran satuan kerja dalam satu tahun anggaran. Nilai IKPA mencerminkan tingkat kepatuhan, efektivitas, efisiensi, serta ketertiban administrasi dalam pengelolaan anggaran sesuai dengan ketentuan perbendaharaan negara. Pelaksanaan anggaran di Politeknik KP Bitung dilaksanakan secara terencana dan akuntabel, mulai dari perencanaan kegiatan, penyerapan anggaran, pengelolaan kontrak, hingga penyampaian laporan keuangan. Seluruh proses tersebut dilakukan dengan mengedepankan prinsip tepat waktu, tepat sasaran, dan sesuai regulasi.

Upaya peningkatan nilai IKPA dilakukan melalui pengendalian deviasi penyerapan anggaran, percepatan pelaksanaan kegiatan, ketepatan penyampaian data kontrak, pengelolaan uang persediaan yang tertib, serta penyusunan dan penyampaian laporan keuangan yang tepat waktu dan akurat. Selain itu, koordinasi yang intensif antara pengelola keuangan, perencana, dan pelaksana kegiatan turut mendukung kelancaran pelaksanaan anggaran.



Dengan pengelolaan anggaran yang efektif dan disiplin, Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung berkomitmen untuk terus meningkatkan nilai IKPA sebagai wujud akuntabilitas kinerja dan dukungan terhadap pencapaian tujuan serta sasaran strategis institusi.

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran merupakan alat ukur untuk menentukan tingkat kinerja satker khususnya dalam pelaksanaan anggaran. Pengukuran kinerja pelaksanaan anggaran dilakukan dengan menggunakan.

INDIKATOR KINERJA – 16

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Politeknik KP Bitung (Nilai)

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran adalah nilai yang dihasilkan atas kinerja perencanaan anggaran untuk tahun anggaran yang telah selesai untuk Menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan anggaran.

Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas perencanaan anggaran melalui aplikasi MONEV Kemeneu. Berdasarkan KMK Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dinilai berdasarkan aspek Efektifitas dan Efisiensi yang dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian capaian setiap indikator dengan bobot pada masing-masing indikator.

Kategori Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dibagi menjadi 5 (lima), antara lain :

Sangat Baik, apabila NKPA > 90;

Baik, apabila NKPA > 80-90;

Cukup, apabila NKPA > 60-80;

Kurang, apabila NKPA > 50-60;

Sangat Kurang, apabila NKPA < 50.



Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas pelaksanaan RKA-KL melalui aplikasi SMART DJA. Capaian evaluasi kinerja meliputi Aspek Implementasi, Aspek Manfaat, dan Aspek Konteks

Formula perhitungan Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran, didapatkan dengan menjumlahkan hasil perkalian Capaian Indikator Kinerja Program, Nilai Efektivitas Satker dan Nilai Efisiensi Satker dengan bobot masing-masing indikator. Adapun bobot setiap indikator Kinerja Anggaran sebagai berikut :

Variabel	Uraian	Bobot
Efektivitas (75)	1. Capaian Indikator Kinerja Program	30
	2. Nilai Efektivitas Satker	45
Efisiensi (25)	3. Nilai Efisiensi Satker	25

C. Akuntabilitas Keuangan

Pelaksanaan program pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan unit Politeknik KP Bitung, yang merupakan UPT Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan, Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan didukung anggaran senilai Rp18.623.497.000,00 realisasi Keuangan sebesar 97,05% (Netto) yang secara umum alokasi anggaran dipergunakan untuk membiayai atau menunjang pelaksanaan operasional sesuai dengan tugas dan fungsi Politeknik KP Bitung.

Tabel Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2025

No.	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	%
1	Belanja Pegawai (51)	11,814,543,000	11,642,884,731	98,55
2	Belanja Barang (52)	6,808,954,000	6,430,900,143	94,45
3	Belanja Modal	0	0	0
Jumlah		18,623,497,000	18,073,784,874	97.05

Capaian Realisasi Anggaran sampai akhir Tahun 2025 senilai 97.05 %, turun dibandingkan dengan capaian tahun 2024 yakni senilai 97,41%.



Tabel Rincian Realisasi Anggaran Tahun 2021-2025

Anggaran	Tahun				
	2021	2022	2023	2024	2025
Pagu Awal	21,353,704,000	23,969,544,000	23,968.038,000	25.239.247.000	24,657,800,000
Pagu Revisi	21,353,704,000	24.145.143,000	23,968.038,000	25.867.747.000	18,623,497,000
Realisasi	21,115,534,765	23.678.660.938	23,110,587,736	25.199.007.014	18,073,784,874
	98.88	98.07	96,42	97.41	97,05

Permasalahan yang masih dihadapi dalam pelaksanaan anggaran diantaranya:

- Beberapa kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang berjalan kurang maksimal dikarenakan adanya blokir anggaran, seperti penelitian dan Pengabdian masyarakat

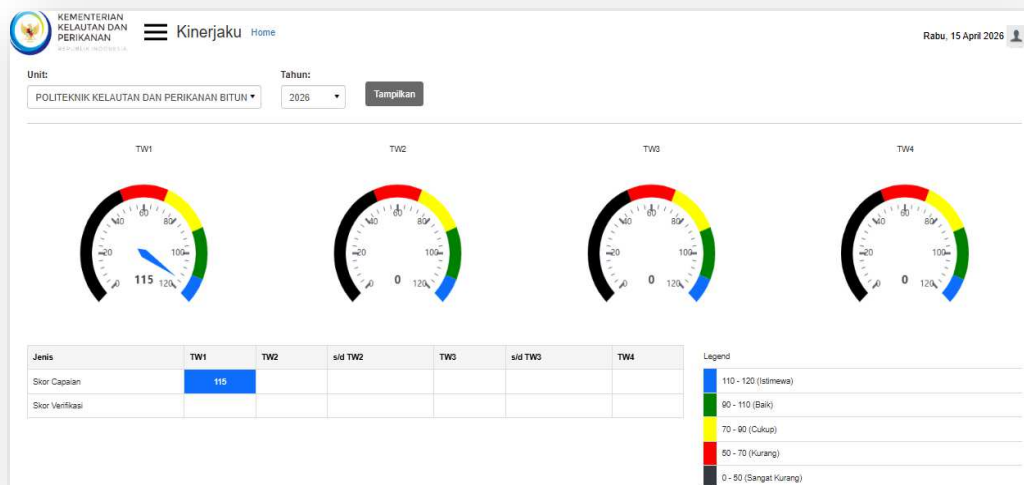
Upaya yang telah dilakukan dalam rangka percepatan realisasi anggaran diantaranya adalah :

- a. Pelaksanaan kegiatan telah disesuaikan dengan rencana aksi yang telah dibuat
- b. Pelaksanaan ROK tepat jadwal.
- c. Melakukan evaluasi atas pelaksanaan prioritas/reguler, penyerapan anggaran dan capaian kinerjanya;
- d. Meningkatkan ketertiban penyampaian data kontrak;
- e. Melakukan penyelesaian tagihan tepat waktu;
- f. Memastikan seluruh pekerjaan dibayarkan sesuai dengan % penyelesaian fisiknya;
- g. Kendala yang dihadapi dalam proses pembayaran langsung berkoordinasi dan konsultasi dengan Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan KPPN Bitung;
- h. Memastikan seluruh administrasi pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran belanja telah sesuai ketentuan;
- i. Berkoordinasi dengan unit Eselon I BPPSDMKP dan Itjen guna pendampingan secara aktif terhadap pelaksanaan kegiatan dan anggaran.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Triwulan I Tahun 2026, Politeknik KP Bitung memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan 2 Sasaran Kegiatan dan 16 Indikator Kinerja Utama. Pengukuran capaian kinerja BPPSDM Tahun 2026 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja utama *key performance indicator* pada masing-masing perspektif. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan pada *website* resmi KKP, yaitu <http://kinerjaku.kkp.go.id>. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data capaian kinerja BPPSDM di tingkat korporat TW I Tahun 2026 sebesar 115%, sebagaimana dashboard kinerjaku sebagai berikut:



Capaian Kinerja TW I Tahun 2026 Politeknik KP Bitung



Dari 16 IKU semuanya telah diukur dan mencapai target sebanyak 2 IKU mencapai target istimewa dan 1 IKU mencapai target baik, rincian target dan realiasi dari IKU tersebut adalah sebagai berikut :

Capaian kinerja TW I Politeknik KP Bitung Tahun 2026 sbb :

No	Indikator	Target Tahun 2026	Target TW I	Capaian TW I	Capaian (%)
1	Lulusan Politeknik KP Bitung yang terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri dan/atau Dunia Kerja (orang)	125	7	16	120
2	Jumlah lulusan Politeknik KP Bitung (orang)	169			
3	Jumlah kerjasama Politeknik KP Bitung di tahun berjalan (kesepakatan)	2			
4	Persentase lulusan Politeknik KP Bitung yang bersertifikasi kompetensi (%)	100			
5	Kajian pendidikan tinggi kelautan dan perikanan Politeknik KP Bitung (Kajian)	3			
6	Kelompok masyarakat yang mengadopsi ilmu pengetahuan dan teknologi di Politeknik KP Bitung (kelompok)	2			
7	Jumlah pendidik Politeknik KP Bitung yang lulus sertifikasi profesi (Orang)	5			
8	Penilaian Mutu Pendidikan Tinggi Kelautan dan Perikanan (%)	79			
9	Persentase Sarana Prasarana Pendidikan KP yang ditingkatkan kapasitasnya di Politeknik KP Bitung (%)	80			
10	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Politeknik KP Bitung (%)	86	86	86	100
11	Penilaian Mandiri SAKIP Politeknik KP Bitung (Nilai)	82			
12	Indeks Profesionalitas ASN Politeknik KP Bitung (Indeks)	85			
13	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BPPSDM KP (Nilai)	71			
14	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Politeknik KP Bitung (%)	77	77	100	120
15	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Politeknik KP Bitung (Nilai)	92,1			



No	Indikator	Target Tahun 2026	Target TW I	Capaian TW I	Capaian (%)
16	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Politeknik KP Bitung (Nilai)	71,75			

B. Permasalahan Dan Rekomendasi

I. Permasalahan

Secara umum, capaian kinerja organisasi menunjukkan hasil yang optimal, dimana seluruh Indikator Kinerja Utama (IKU) dapat terealisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Namun demikian, dalam proses pencapaiannya masih terdapat beberapa permasalahan yang perlu menjadi perhatian, antara lain:

1. Pemanfaatan teknologi informasi yang belum maksimal dalam mendukung efisiensi dan efektivitas pelaporan serta monitoring kinerja.
2. Kebijakan pusat dan dinamika anggaran, yang melakukan efisiensi, dalam beberapa kondisi dapat mempengaruhi waktu pelaksanaan kegiatan.

II. Rekomendasi

Sebagai upaya peningkatan dan keberlanjutan capaian kinerja ke depan, direkomendasikan beberapa langkah sebagai berikut:

1. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, termasuk pengembangan sistem monitoring dan evaluasi berbasis digital untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat dan akurat.
2. Peningkatan perencanaan yang adaptif, dengan mempertimbangkan potensi risiko dan dinamika kebijakan, sehingga pelaksanaan kegiatan tetap berjalan efektif.

C. Efisiensi Anggaran Dan Alokasi Sumber Daya

Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung sebagai organisasi sektor publik dituntut untuk memperhatikan *value for money* dalam menjalankan aktivitasnya. Tujuan yang dikehendaki masyarakat mencakup pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan yaitu ekonomis dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisien dalam penggunaan sumber daya dalam arti penggunaannya



diminimalkan dan hasilnya dimaksimalkan, serta efektif dalam arti mencapai tujuan dan sasaran (maximizing benefits and minimizing costs), serta efektif (berhasil guna) dalam arti mencapai tujuan dan sasaran. Efisiensi terdiri atas efisiensi keluaran (output) Program untuk evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi tingkat satker/program dan efisiensi keluaran (output) kegiatan untuk evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi tingkat satuan kerja/kegiatan. Dalam rangka Laporan Kinerja Politeknik KP Bitung penghitungan efisiensi data yang dibutuhkan untuk mengukur efisiensi keluaran program dan efisiensi keluaran output kegiatan meliputi: data capaian keluaran program, data capaian keluaran kegiatan, pagu anggaran dan realisasi anggaran. Efisiensi dihitung dengan cara membandingkan selisih antara pengeluaran seharusnya dan pengeluaran sebenarnya dengan pengeluaran seharusnya. Penghitungan nilai efisiensi ini telah tersedia berbasis sistem dan dikembangkan oleh Kementerian Keuangan RI melalui aplikasi Smart DJA, Nilai efisiensi sampai tahun 2025 berakhir masih di posisi 100%, output yang sudah tercapai namun realisasi anggarannya masih kurang, sehingga pada aplikasi Smart DJA terbaca 100%.

Namun untuk beberapa detail kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan seperti pemeliharaan beberapa gedung realisasi anggarannya dibawah Pagu yang ada.

Agar efisiensi keluaran maupun efisiensi kegiatan telah berjalan dengan baik perlu mendapatkan perhatian dan pengawalan secara baik dalam rangka peningkatan kinerja dan konsistensi terhadap pelaksanaan anggaran di tahun berikutnya.

Upaya yang telah dilakukan diantaranya adalah :

- a. Membangun budaya efisiensi birokrasi
- b. Mengevaluasi penyerapan anggaran
- c. Mengendalikan penerimaan negara
- d. Menjamin penyelesaian penggunaan uang persediaan
- e. Memastikan semua transaksi tercatat sebelum penutupan buku kas negara
- f. Berkoordinasi dengan pihak terkait

LAMPIRAN

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Januari Tahun 2026



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN
JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NO.10
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513287
LAMARAN www.kkp.go.id SUREL arsdm@kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026 POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN BITUNG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Rudi Saranga

Jabatan : Direktur Politeknik KP Bitung

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Alan Frendy Koropitan

Jabatan : Kepala Pusat Pendidikan KP

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 6 Januari 2026

Pihak Kedua
Kepala Pusat Pendidikan Kelautan
dan Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Alan Frendy Koropitan

Pihak Pertama
Direktur Politeknik Kelautan dan
Perikanan Bitung



Ditandatangani
Secara Elektronik

Rudi Saranga

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN BITUNG

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1	Terselenggaranya Pendidikan Vokasi Kelautan dan Perikanan Yang Kompeten	1	Lulusan Politeknik KP Bitung yang terdapat di Dunia Usaha, Dunia Industri dan/atau Dunia Kerja (orang)	125
		2	Jumlah lulusan Politeknik KP Bitung (orang)	169
		3	Jumlah kerjasama Politeknik KP Bitung di tahun berjalan (kesepakatan)	2
		4	Persentase lulusan Politeknik KP Bitung yang bersertifikasi kompetensi (%)	100
		5	Kajian pendidikan tinggi kelautan dan perikanan Politeknik KP Bitung (Kajian)	3
		6	Kelompok masyarakat yang mengadopsi ilmu pengetahuan dan teknologi di Politeknik KP Bitung (kelompok)	2
		7	Jumlah pendidik Politeknik KP Bitung yang lulus sertifikasi profesi (Orang)	5
		8	Penilaian Mutu Pendidikan Tinggi Kelautan dan Perikanan (%)	79
		9	Persentase Sarana Prasarana Pendidikan KP yang ditingkatkan kapasitasnya di Politeknik KP Bitung (%)	80
2	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	10	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Politeknik KP Bitung (%)	86
		11	Penilaian Mandiri SAKIP Politeknik KP Bitung (Nilai)	82
		12	Indeks Profesionalitas ASN Politeknik KP Bitung (Indeks)	85
		13	Nilai Pengawasan Keabsahan Internal BPPSDM KP (Nilai)	71
		14	Persentase rencana umum pengadaan PEJ yang diumumkan pada SIRUP Politeknik KP Bitung (%)	77
		15	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Politeknik KP Bitung (Nilai)	92,1
		16	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Politeknik KP Bitung (Nilai)	71,75

Data Anggaran

No	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1	Pendidikan Kelautan dan Perikanan	7.184.769.000
2	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPPSDMKP	13.712.905.000
Total Anggaran Politeknik KP Bitung Tahun 2026		20.897.674.000

Jakarta, 6 Januari 2026

Pihak Kedua
Kepala Pusat Pendidikan Kelautan
dan Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Alan Frendy Koropitan

Pihak Pertama
Direktur Politeknik Kelautan dan
Perikanan Bitung



Ditandatangani
Secara Elektronik

Rudi Saranga

Lampiran 2. RENSTRA BPPSDM KP 2025- 2029

KERANGKA PENDANAAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN 2025-2029

Program /Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan	Indikator Strategis/Indikator Program/Indikator Kegiatan	Target					Anggaran (Rp.juta)				
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
Badan Penyuluhan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan Dan Perikanan								1.320.753	1.885.293	1.959.272	2.040.422	2.140.369
	Sasaran Strategis 4: Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	Indeks Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (Indeks)	70	72	74	76	78					
	Sasaran Strategis 5: Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Kelautan dan Perikanan (Indeks)	90,05	90,10	90,15	90,20	90,25					
DL. Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi								259.428,16	592.907,50	625.579,00	664.172,90	716.771,90
	01-Meningkatnya Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	01-Persentase Lulusan Pendidikan dan Pelatihan Kelautan dan Perikanan Kompeten dan/atau Tersertifikasi yang Tersekap di Dunia Usaha, Dunia Industri dan/atau Dunia Kerja (DUDIKA) (Persen)	75	76	77	78	79					

Program /Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan	Indikator Strategis/Indikator Program/Indikator Kegiatan	Target					Anggaran (Rp.juta)				
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
		02-Persentase Peningkatan Omzet pada Kelompok Pelaku Usaha/Pelaku Utama Sektor Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kelasnya (Persen)	50	52	54	56	58					
2375-Pelatihan Kelautan dan Perikanan								39.418,97	116.873,50	124.143,50	140.013,50	155.918,50
	01-Terselenggaranya Pelatihan Kelautan dan Perikanan yang Kompeten	01-Persentase Lulusan Pelatihan Kelautan dan Perikanan Kompeten yang Tersekap di Dunia Usaha, Dunia Industri dan/atau Dunia Kerja (DUDIKA) (Persen)	75	76	77	78	79					
	AAH-Peraturan Lainnya											
	111- Peraturan Pelatihan Kelautan dan Perikanan yang Disusun	01-Jumlah Peraturan Pelatihan Kelautan dan Perikanan yang Disusun (Rancangan Peraturan)	-	5	6	7	8					
	121-Inovasi yang diterapkan untuk Pelatihan Kelautan dan Perikanan	01-Jumlah Inovasi yang diterapkan untuk Pelatihan Kelautan dan Perikanan (Kajian)	1	5	7	10	12					
	ADF-Sertifikasi Lembaga											
	141-Sertifikasi Kelembagaan Pelatihan Kelautan dan Perikanan sesuai Standard Lembaga Pelatihan	01-Jumlah Sertifikasi Kelembagaan Pelatihan Kelautan dan Perikanan sesuai Standard Lembaga Pelatihan (Lembaga)	10	7	8	8	8					
		02-Persentase Usulan Sertifikasi Program Diklat Masyarakat Bidang Kelautan dan Perikanan yang disahkan sesuai dengan Peraturan yang Berlaku (Persen)	-	75	76	77	78					

Program /Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan	Indikator Strategis/Indikator Program/Indikator Kegiatan	Target					Anggaran (Rp.juta)				
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
	AEA-Koordinasi											
	151-Koordinasi Pengelolaan Lulusan Pelatihan Kelautan dan Perikanan	01-Jumlah Koordinasi Pengelolaan Lulusan Pelatihan Kelautan dan Perikanan (Kegiatan)	-	2	4	5	6					
	AEE-Kemitraan											
	152-Kemitraan, Jejaring dan Kerjasama Pelatihan Kelautan dan Perikanan	01-Jumlah Kemitraan, Jejaring dan Kerjasama Pelatihan Kelautan dan Perikanan (Kesepakatan)	-	18	20	22	25					
	AFA-Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria											
	161-Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria Pelatihan Kelautan dan Perikanan	01-Jumlah Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria Pelatihan Kelautan dan Perikanan (NSPK)	3	10	15	17	20					
	RAL-Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan											
	711-Peralatan dan Mesin Pelatihan Kelautan dan Perikanan	01-Jumlah Peralatan dan Mesin Pelatihan Kelautan dan Perikanan (Unit)	5	10	10	10	10					
	RBO-Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan											
	721-Gedung, Bangunan dan Prasarana Pelatihan Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	01-Jumlah Gedung, Bangunan, dan Prasarana Pelatihan Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	2	10	10	10	10					
	SCC-Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan											
	831- Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Dilatih	01-Jumlah Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Dilatih (Orang)	25.354	35.992	38.236	39.691	42.319					

Program /Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan	Indikator Strategis/Indikator Program/Indikator Kegiatan	Target					Anggaran (Rp.juta)				
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
		02-Jumlah Lulusan Pelatihan Kelautan dan Perikanan Kompeten yang Terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri dan/atau Dunia Kerja (DUDIKA) (Orang)	17.804	26.994	28.677	29.768	31.739					
2376-Pendidikan Kelautan dan Perikanan								188.797,65	326.200,00	341.050,00	345.410,00	372.370,00
		01-Persentase Lulusan Pendidikan Kelautan dan Perikanan Kompeten yang terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri dan/atau Dunia Kerja (DUDIKA) (Persen)	85	86	87	88	89					
	ABW-Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Kelautan											
	121-Kajian Pendidikan Tinggi Kelautan dan Perikanan	01-Jumlah Kajian Pendidikan Tinggi Kelautan dan Perikanan (Kajian)	51	63	65	67	69					
	AFA-Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria											
	161-Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria Pendidikan Kelautan dan Perikanan	01-Jumlah Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria Pendidikan Kelautan dan Perikanan (NSPK)	6	4	5	5	5					
	PDE-Akreditasi Lembaga											
	541-Akreditasi Lembaga dan/atau Program Studi Pendidikan Kelautan dan Perikanan	01-Jumlah Akreditasi Lembaga dan/atau Program Studi Pendidikan Kelautan dan Perikanan (Unit Kerja)	17	17	17	17	17					
	PDI-Sertifikasi Profesi dan SDM											
	545-Sertifikasi Profesi dan SDM Pendidikan Kelautan dan Perikanan	01-Jumlah Sertifikasi Profesi dan SDM Pendidikan Kelautan dan Perikanan (Orang)	500	505	510	515	520					

Program /Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan	Indikator Strategis/Indikator Program/Indikator Kegiatan	Target					Anggaran (Rp.juta)				
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
	QCC-Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Pendidikan											
	671-Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Pendidikan Kelautan dan Perikanan	01-Jumlah Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Pendidikan Kelautan dan Perikanan (Lembaga)	16	16	16	16	16					
	RAA-Sarana Bidang Pendidikan											
	711-Peralatan dan Mesin Pendidikan Kelautan dan Perikanan	01-Jumlah Peralatan dan Mesin Pendidikan Kelautan dan Perikanan (Paket)	3	13	13	16	16					
	RAN-Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi											
	715-Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	01-Jumlah Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (Unit)	2	16	16	16	16					
	RBI-Prasarana Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah											
	721-Gedung, Bangunan dan Prasarana Pendidikan Menengah yang Ditingkatkan Kapasitasnya	01-Jumlah Gedung, Bangunan dan Prasarana Pendidikan Menengah yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	1	5	5	5	5					
	RBI-Prasarana Bidang Pendidikan Tinggi											
	725-Gedung, Bangunan dan Prasarana Pendidikan Tinggi yang Ditingkatkan Kapasitasnya	01-Jumlah Gedung, Bangunan dan Prasarana Pendidikan Tinggi yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	2	11	11	11	11					
	SAC-Pendidikan Vokasi Bidang Pertanian, Kelautan, dan Perikanan											

/Kegiatan	Program/Sasaran Kegiatan	Program/Indikator Kegiatan	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
	811-Peserta Pendidikan Vokasi Kelautan dan Perikanan Yang Kompeten	01-Jumlah Peserta Pendidikan Vokasi Kelautan dan Perikanan Yang Kompeten (Orang)	7.615	7.186	7.186	7.186	7.186					
		02-Jumlah Lulusan Satuan Pendidikan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Orang)	2.507	1.970	2.187	2.187	2.187					
		03-Jumlah Lulusan Pendidikan Kelautan dan Perikanan Kompeten yang Terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri dan/atau Dunia Kerja (DUDIKA) (Orang)	2.134	1.675	1.859	1.859	1.859					
	SDC-Penelitian dan Pengembangan Modeling											
	843-Ilmu Pengetahuan atau Teknologi Pendidikan Tinggi yang diterapkan kepada Masyarakat	01-Jumlah Ilmu Pengetahuan atau Teknologi Pendidikan Tinggi yang diterapkan kepada Masyarakat (Model)	14	22	24	25	26					
7020-Penyuluhan Kelautan dan Perikanan								30.405,09	88.840,00	96.116,00	106.895,00	116.275,00
		01-Persentase Kelompok Pelaku Utama/Usaha Sektor Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kelasnya (Persen)	6	13	16	19	22					
	ABW-Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Kelautan											
	126-Inovasi yang diterapkan untuk Penyuluhan Masyarakat Kelautan dan Perikanan	01-Jumlah Inovasi yang diterapkan untuk Penyuluhan Masyarakat Kelautan dan Perikanan (Rekomendasi Kebijakan)	1	9	10	11	12					
	128-Rekomendasi dan Model Pemberdayaan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan	01-Jumlah Rekomendasi dan Model Pemberdayaan Sosial Ekonomi Kelautan dan	1	9	10	11	12					

Program /Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan	Indikator Strategis/Indikator Program/Indikator Kegiatan	Target					Anggaran (Rp.juta)				
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
		Perikanan (Rekomendasi Kebijakan)										
	129-Teknologi Terekomendasi untuk Penyelenggaraan Penyuluhan Masyarakat Kelautan dan Perikanan	01-Jumlah Teknologi Terekomendasi untuk Penyelenggaraan Penyuluhan Masyarakat Kelautan dan Perikanan (Rekomendasi Kebijakan)	-	5	5	5	5					
	AFA-Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria											
	166-Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	01-Jumlah Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (NSPK)	4	4	4	4	4					
	DCC-Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan											
	436-Penyuluh Perikanan yang Bersertifikat Kompetensi	01-Jumlah Penyuluh Perikanan yang Bersertifikat Kompetensi (Orang)	50	200	300	400	500					
	QDB-Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga											
	646-Fasilitasi dan Pembinaan Desa Perikanan	01-Jumlah Fasilitasi dan Pembinaan Desa Perikanan (Lembaga)	1	10	10	12	14					
	QDD-Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat											
	646-Kelompok Pelaku Utama/Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pendampingan dari Penyuluh Kelautan dan Perikanan	01-Jumlah Kelompok Pelaku Utama/Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pendampingan dari Penyuluh Kelautan dan Perikanan (Kelompok Masyarakat)	35.000	40.100	44.300	48.000	53.000					
		02-Jumlah Kelompok Pelaku Utama/Usaha Sektor Kelautan	1.157	1.326	1.464	1.621	1.746					

Program /Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan	Indikator Strategis/Indikator Program/Indikator Kegiatan	Target					Anggaran (Rp.juta)				
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
		dan Perikanan yang Meningkatkan Kelasnya (Kelompok Masyarakat)										
	QKA-Pemantauan masyarakat dan kelompok masyarakat											
	696-Pemantauan Sosial Ekonomi Masyarakat Kelautan dan Perikanan di Lokasi Program Prioritas KKP	01-Jumlah Pemantauan Sosial Ekonomi Masyarakat Kelautan dan Perikanan di Lokasi Program Prioritas KKP (Kelompok Masyarakat)	1	10	10	10	10					
	RAL-Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan											
	716-Peralatan dan Mesin Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	01-Jumlah Peralatan dan Mesin Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Unit)	1	5	5	5	5					
	RBQ-Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan											
	726-Gedung, Bangunan dan Prasarana Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	01-Jumlah Gedung, Bangunan dan Prasarana Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	1	8	10	10	10					
	SDC-Penelitian dan Pengembangan Modeling											
	648-Percontohan Penyuluhan/Model Pemberdayaan Sosial Ekonomi yang diterapkan kepada Masyarakat Kelautan dan Perikanan	01-Jumlah Percontohan Penyuluhan/Model Pemberdayaan Sosial Ekonomi yang diterapkan kepada Masyarakat Kelautan dan Perikanan (Model)	-	7	11	15	19					

Program /Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan	Indikator Strategis/Indikator Program/Indikator Kegiatan	Target					Anggaran (Rp.juta)				
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
	722-Gedung, Bangunan dan Prasarana Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	01-Jumlah Gedung, Bangunan dan Prasarana Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	-	4	4	4	4					
WA-Program Dukungan Manajemen								1.061.325	1.292.386	1.333.693	1.376.249	1.423.597
	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel dalam penyelenggaraan penyuluhan dan pengembangan sumber daya kelautan dan perikanan	01-Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (Nilai)	86	86,5	87	87,5	88					
2378-Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan								1.049.186	1.263.306	1.302.613	1.343.169	1.385.017
	01-Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel di Lingkungan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	01-Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK BPPSDM KP (Persen)	≤0,5	≤0,5	≤0,5	≤0,5	≤0,5					
		02-Indeks Profesionalitas ASN BPPSDM KP (Indeks)	81	81,5	82	82,5	83					
		03-Penilaian Mandiri SAKIP BPPSDM KP (Nilai)	88	88,2	88,4	88,6	88,8					
		04-Nilai Maturitas Struktur dan Proses SPIP BPPSDM KP (Nilai)	3,5	3,6	3,7	3,8	3,9					
		05-Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BPPSDM KP (Persen)	85	86	87	88	89					

Program /Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan	Indikator Strategis/Indikator Program/Indikator Kegiatan	Target					Anggaran (Rp.juta)				
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
	AFA-Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria											
	162-Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	01-Jumlah Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (NSPK)	-	8	9	10	12					
	PAH-Peraturan lainnya											
	513-Standard Kompetensi Profesi yang Disusun Bidang Kelautan dan Perikanan	01-Jumlah Standard Kompetensi Profesi yang Disusun Bidang Kelautan dan Perikanan (Peraturan)	-	8	9	10	12					
	PDI-Sertifikasi Profesi dan SDM											
	542-Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Bersertifikat Kompetensi	01-Jumlah Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Bersertifikat Kompetensi (Orang)	740	22.500	23.000	23.500	24.500					
		02-Jumlah Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yang Mengikuti Ujian Kompetensi Bidang Kelautan dan Perikanan (Orang)	1.057	28.125	28.395	28.658	29.518					
	RAL-Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan											
	712-Peralatan dan Mesin Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	01-Jumlah Peralatan dan Mesin Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (Unit)	-	4	4	4	4					
	RBQ-Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan											

Program /Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan	Indikator Strategis/Indikator Program/Indikator Kegiatan	Target					Anggaran (Rp.juta)				
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
		06-Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPPSDM KP (Nilai)	92	92,1	92,15	92,2	92,2					
		07-Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPPSDM KP (Nilai)	81,5	81,75	82	82,25	82,5					
		08-Persentase penyelesaian program penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (Persen)	100	100	100	100	100					
		09-Nilai pengawasan kearsipan internal BPPSDM KP (Nilai)	80	81	82	83	84					
		10-Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BPPSDM KP (Persen)	76	77	78	79	80					
		11-Nilai Pembangunan Integritas BPPSDM KP (Nilai)	76	77	78	79	80					
		12-Persentase Penyelesaian Proses Bisnis dan SOP BPPSDM KP (Persen)	65	85	85	85	85					
		13-Nilai Proposal Inovasi Pelayanan Publik BPPSDM KP (Nilai)	77	78	79	80	81					
	AEC-Kerja sama											
	964-Layanan Kerja Sama	01-Jumlah Layanan Kerja Sama (Dokumen)	1	13	13	13	13					
	BMA-Data dan Informasi Publik											
	291-Data dan Informasi Publik Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber	01-Jumlah Data dan Informasi Publik Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya	0	2	2	2	2					

Program /Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan	Indikator Strategis/Indikator Program/Indikator Kegiatan	Target					Anggaran (Rp.juta)				
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
	Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	Manusia Kelautan dan Perikanan (Layanan)										
	CAN-Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi											
	311-Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	01-Jumlah Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (Unit)	0	1	1	1	1					
	CBT-Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi											
	321-Prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	01-Jumlah Prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (Unit)	0	1	1	1	1					
	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal											
	956-Layanan BMN	01-Jumlah Layanan BMN (Layanan)	18	18	18	18	18					
		02-Jumlah Layanan Pengadaan Barang/jasa (Layanan)	18	18	18	18	18					
	957-Layanan Hukum	01-Jumlah Layanan Hukum (Layanan)	1	1	1	1	1					
	958-Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	01-Jumlah Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi (Layanan)	22	22	22	22	22					
	960-Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	01-Jumlah Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal (Layanan)	6	6	6	6	6					

Program /Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan	Indikator Strategis/Indikator Program/Indikator Kegiatan	Target					Anggaran (Rp.juta)				
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
		02-Jumlah Layanan Penyelenggaraan Proses Bisnis dan Penyusunan SOP BPPSDMKP (Layanan)	6	6	6	6	6					
	962-Layanan Umum	11-Jumlah Layanan Umum (Layanan)	43	43	43	43	43					
	963-Layanan Data dan Informasi	01-Jumlah Layanan Data dan Informasi (Layanan)	10	10	10	10	10					
	969-Layanan Bantuan Hukum	01-Jumlah Layanan Bantuan Hukum (Layanan)	5	5	5	5	5					
	994-Layanan Perkantoran	01-Jumlah Layanan Gaji dan Tunjangan (Layanan)	43	43	43	43	43					
		02-Jumlah Layanan Operasional Perkantoran (Layanan)	43	43	43	43	43					
	EBB-Layanan Sarana dan Prasarana Internal											
	951-Layanan Sarana Internal	01-Jumlah Layanan Sarana Internal (Paket)	3	3	3	3	3					
	971-Layanan Prasarana Internal	01-Jumlah Layanan Prasarana Internal (Unit)	2	2	2	2	2					
	EBC-Layanan Manajemen SDM Internal											
	954-Layanan Manajemen SDM	01-Jumlah Layanan Manajemen SDM (Layanan)	17	17	17	17	17					
	EBD-Layanan Manajemen Kinerja Internal											
	952-Layanan Perencanaan dan Penganggaran	01-Jumlah Layanan Perencanaan dan Penganggaran (Dokumen)	31	31	31	31	31					
	953-Layanan Pemantauan dan Evaluasi	01-Jumlah Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Dokumen)	29	29	29	29	29					
	955-Layanan Manajemen Keuangan	01-Jumlah Layanan Manajemen Keuangan (Dokumen)	41	41	41	41	41					

Program /Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan	Indikator Strategis/Indikator Program/Indikator Kegiatan	Target					Anggaran (Rp.juta)				
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
		02-Jumlah Layanan Penyelenggaraan Penyusunan Laporan Keuangan (Dokumen)	41	41	41	41	41					
		03-Jumlah Layanan Penyelenggaraan SPIP (Dokumen)	41	41	41	41	41					
		04-Jumlah Layanan Penyelenggaraan Perbaikan Kinerja (Dokumen)	41	41	41	41	41					
	974-Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	01-Jumlah Layanan Penyelenggaraan Kearsipan (Dokumen)	12	12	12	12	12					
	FAB-Sistem Informasi Pemerintahan											
	461-Sistem Informasi Pemerintahan Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	01-Jumlah Sistem Informasi Pemerintahan Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (Sistem Informasi)	1	1	1	1	1					
4345-Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kelautan dan Perikanan								12.139,36	29.080,00	31.080,00	33.080,00	38.580,00
	01-Aparatur KKP yang Dididik dan Dilatih	01-Jumlah Aparatur KKP yang Diberikan Tugas Belajar (Orang)	167	168	169	170	171					
		02-Jumlah Aparatur KKP yang Diberikan Izin Belajar (Orang)	68	69	70	71	72					
		03-Jumlah Aparatur KKP yang Diberikan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Aparatur (Orang)	4525	4620	4870	5770	6470					
	02-Terpenyuhnya Layanan Sarana dan Prasarana Internal	01-Sarana Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Paket)	0	3	3	3	3					

Program /Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan	Indikator Strategis/Indikator Program/Indikator Kegiatan	Target					Anggaran (Rp.juta)				
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
		02-Prasarana Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Paket)	0	2	2	2	2					
	03-Terselenggaranya Tata Kelola Pendidikan dan Pelatihan Aparatur KKP	01-Kelembagaan Publik Pendidikan dan Pelatihan Aparatur KKP yang Terakreditasi (Lembaga)	0	2	2	2	2					
		02-Norma Standard Prosedur dan Kriteria Pendidikan dan Pelatihan Aparatur KKP yang Disusun (NSPK)	0	7	12	17	22					
	ADE-Akreditasi Lembaga											
	141-Akreditasi Lembaga Pelatihan Aparatur Kelautan dan Perikanan	01-Jumlah Lembaga Pelatihan Aparatur Kelautan dan Perikanan yang Terakreditasi (Lembaga)	-	2	2	2	2					
	AFA-Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria											
	161-Norma Standard Prosedur dan Kriteria Pelatihan Aparatur Kelautan dan Perikanan	01-Jumlah Norma Standard Prosedur dan Kriteria Pelatihan Aparatur Kelautan dan Perikanan (NSPK)	-	5	10	15	20					
	163-Norma Standard Prosedur dan Kriteria Pendidikan Aparatur Kelautan dan Perikanan	01-Jumlah Norma Standard Prosedur dan Kriteria Pendidikan Aparatur Kelautan dan Perikanan (NSPK)	-	2	2	2	2					
	EBB-Layanan Sarana dan Prasarana Internal											
	951-Layanan Sarana Internal	01-Jumlah Layanan Sarana Internal (Paket)	-	3	3	3	3					
	971-Layanan Prasarana Internal	01-Jumlah Layanan Prasarana Internal (Unit)	-	2	2	2	2					

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Program /Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan	Indikator Strategis/Indikator Program/Indikator Kegiatan	Target					Anggaran (Rp.juta)				
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
	EBC-Layanan Manajemen SDM Internal											
	996-Layanan Pendidikan dan Pelatihan	01-Jumlah Aparatur KKP yang Diberikan Beasiswa (Orang)	167	168	169	170	171					
		02-Jumlah Aparatur KKP yang Diberikan Izin Belajar (Orang)	68	69	70	71	72					
		03-Jumlah Aparatur Kelautan dan Perikanan yang kompeten (Orang)	4.525	4.620	4.870	5.770	6.470					

KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN,

Ttd.

I NYOMAN RADIARTA

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Sekretaris Badan Penyuluhan
dan Pengembangan SDM KP



Ditandatangani
Secara Elektronik

Joni Haryadi D